

Laporan **Kinerja** **2023**

DIREKTORAT PENGEMBANGAN
METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat selama tahun 2023 kepada Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. LAKIN ini disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*. Laporan ini memberikan gambaran mengenai pencapaian misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei yang sejalan dengan visi BPS dan penyelenggaraan kegiatan sasaran strategis yaitu tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan laporan pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi BPS dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2023 dan memberikan rekomendasi pada tahun 2024.

Jakarta, Februari 2024

Direktur
Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei,



Sarpono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi.....	2
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran.....	2
1.4. Potensi dan Permasalahan.....	3
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis.....	6
2.2. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024	8
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	8
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1. Analisis Capaian Kinerja	10
3.2. Prestasi dan Inovasi Direktorat PMSS Tahun 2023	51
3.3. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023.....	53
BAB 4. PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2023	8
Tabel 3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Direktorat PMSS.....	10
Tabel 3.2. Nama Survei Yang Telah Diselesaikan Penyusunan Desain Sampling dan Pengukuran Sampel Pada Tahun 2023	13
Tabel 3.3. Daftar Survei Bidang Statistik Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, serta Neraca Tahun 2023.....	17
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Turunan: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	31
Tabel 3.5. Jumlah Master Wikerstat yang Dimutakhirkan pada Tahun 2023.....	33
Tabel 3.6. Jenis Pembinaan pada Direktorat PMSS	37
Tabel 3.7. Jenis Kerja Sama pada Direktorat PMSS.....	43
Tabel 3.8. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program Direktorat PMSS Tahun 2023 ..	53
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Menurut Program dan Sasaran Direktorat PMSS Tahun 2023	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Komposisi SDM Direktorat PMSS Menurut Jenjang Jabatan	3
Gambar 3.1. Jumlah Pengguna Menurut Media yang Digunakan	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2023 sampai dengan 2020	61
Lampiran 2. Realisasi Kinerja per IKU dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun Pertama Periode Renstra (2020).....	64
Lampiran 3. Realisasi Kinerja per IKU Tahun 2023 terhadap Target Renstra Tahun 2023	65
Lampiran 4. Realisasi Kinerja per IKU Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra 2024	66
Lampiran 5. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	67
Lampiran 6. Metadata Indikator Kinerja Utama Direktorat PMSS 2020-2024.....	69
Lampiran 7. Jumlah SDM Direktorat PMSS Menurut Jabatan dan Jenjang Pendidikan (Kondisi Desember 2023)	75

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Perka BPS Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Tugas Direktorat PMSS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standarisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik. Misi Direktorat PMSS yaitu:

- a. Menyediakan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI), dan
- b. Membina K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei.

Pelaksanaan misi tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari Direktorat PMSS. Tujuan pertama adalah terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data yang berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan pertama adalah:

- a. Tersedianya metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas;
- b. Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran;
- c. Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data;
- d. Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas.

Tujuan kedua adalah mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data. Sasaran strategis dari tujuan kedua ini adalah terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik).

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2023 Direktorat PMSS melaksanakan berbagai kegiatan yang mengacu pada Program Penyediaan

dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang terdiri dari beberapa kegiatan. Kode dan nama kegiatan yang menjadi tanggungjawab Direktorat PMSS adalah [2900]. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei; [2910]. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Rata-rata capaian sasaran sebesar 100 persen.

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 54 dengan. Dalam pelaksanaan program Direktorat PMSS tersebut terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi yaitu:

- a. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas pegawai di bidang metodologi sensus dan survei yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang padat pada jam kerja. Terbatasnya sarana (laptop, koneksi internet, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia).
- b. Peningkatan kebutuhan pengembangan metodologi integrasi data, sumber data dan permintaan data SBR sehingga dibutuhkan payung hukum terkait peraturan petunjuk teknis statistik ekonomi terintegrasi.
- c. Kendala pemutakhiran wilayah kerja statistik seperti keterlambatan pengiriman peta dari daerah, permasalahan batas antar provinsi, pemekaran wilayah, serta kendala teknis terkait pengolahan peta dan titik bangunan.
- d. Keterlambatan pengolahan data, keterbatasan akses data, dan perubahan proses bisnis pada waktu menjelang kegiatan menghambat dalam penyusunan metodologi dan daftar sampel.
- e. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektoral belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektoral.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat PMSS untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai media dan metode pembelajaran, misalnya secara daring melalui forum diskusi dan knowledge sharing reguler dalam program Jumat Harmonis antar-pegawai di dalam unit kerja PMSS. Selain itu, dilakukan optimalisasi pengaturan beban tugas yang seimbang dari segi volume, waktu, kemampuan SDM, dan jumlah SDM.

- b. Mengusulkan ke pimpinan dan berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Kegiatan untuk dapat membuat dan menetapkan payung hukum terkait peraturan petunjuk teknis statistik ekonomi terintegrasi.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait baik eksternal maupun internal BPS.
- d. Melakukan supervisi ke BPS Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membantu penyelesaian kendala dan memastikan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang ditentukan.

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat PMSS, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat PMSS menunjukkan keberhasilan karena mencapai target pencapaian kinerja. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 100 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat PMSS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi Direktorat PMSS.

BAB 1. PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) merupakan unit kerja Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengemban tugas pemerintah untuk pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.

Sebagai perwujudan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP). Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada awal tahun 2023, Direktorat PMSS menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PMSS 2023. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut dipantau setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (pelaporan capaian kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2023 merupakan perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Laporan ini pun akan digunakan sebagai umpan balik dalam memicu perbaikan kinerja Direktorat PMSS di tahun yang akan datang.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat PMSS berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Direktorat PMSS berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

2. Tugas

Tugas Direktorat PMSS menurut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Bagian Ketiga Pasal 36 adalah melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standarisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PMSS menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan desain sensus dan survei,
- b. Pelaksanaan pengembangan standarisasi dan klasifikasi statistik,
- c. Pelaksanaan pengembangan kerangka sampel, dan
- d. Pelaksanaan pengembangan pemetaan statistik

4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Direktorat PMSS menurut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Bagian Ketiga Pasal 38 adalah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

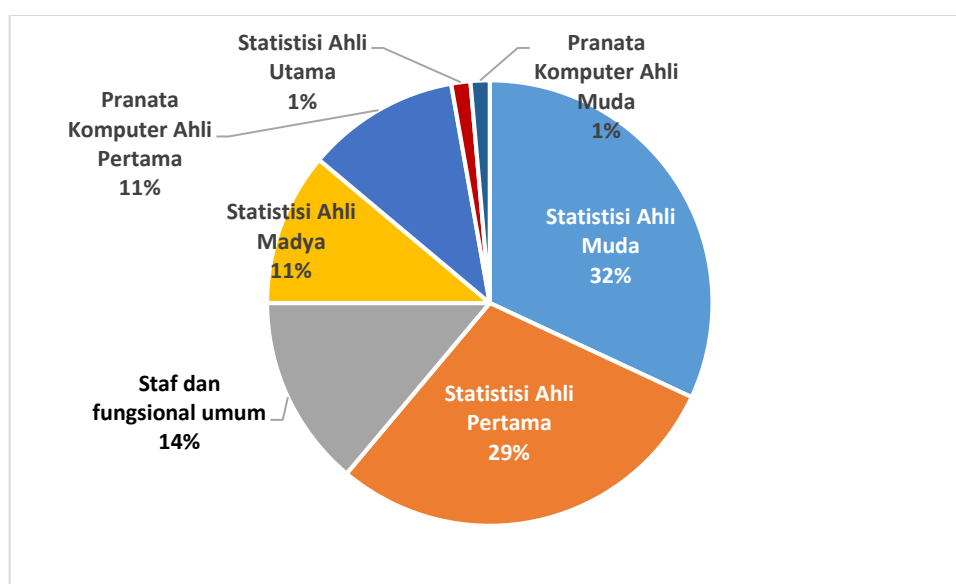
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, BPS melalui Perka BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Perka BPS Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, telah menetapkan susunan organisasi yang baru. Susunan organisasi BPS terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Kedepatian, Inspektorat Utama, Pusdiklat dan Instansi Vertikal.

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) berada di bawah Kedepatian Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Struktur organisasi Direktorat PMSS

terdiri dari Direktur PMSS membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut.

Pada akhir tahun 2023, SDM Direktorat PMSS seluruhnya berjumlah 73 pegawai. Jumlah pegawai aktif sebanyak 72 pegawai, sedangkan 1 pegawai sedang melaksanakan Tugas Belajar. Tiga jenjang jabatan terbanyak adalah Statistisi Ahli Muda, Statistisi Ahli Pertama dan staf. Komposisi SDM menurut jenjang jabatan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut. Komposisi SDM menurut jenjang pendidikan dan jabatan dapat dilihat pada Lampiran 7.



Gambar 1.1. Komposisi SDM Direktorat PMSS Menurut Jenjang Jabatan

1.4. Potensi dan Permasalahan

Dalam perjalanannya mengemban tugas sesuai amanat Perka BPS Nomor 7 Tahun 2020 dan mengacu uraian tugas yang tercantum dalam Perka BPS Nomor 1 Tahun 2009, Direktorat PMSS berupaya memenuhi kebutuhan kegiatan statistik kependudukan, pertanian, dan bidang ekonomi. Namun demikian, Direktorat PMSS terus melakukan pengembangan desain sensus dan survei, klasifikasi dan standardisasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik. Direktorat PMSS harus dapat memberi wawasan dan melakukan pembinaan terkait metodologi sensus dan survei yang mencakup semua aspek. Selain itu, tugas yang tak kalah penting dan menjadi amanat Direktorat PMSS dan BPS secara keseluruhan adalah pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi survei serta sebagai pembina standar data dalam implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Dalam mendukung tugas Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (Deputi MIS) khususnya terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi,

Direktorat PMSS mengembangkan penyelenggaraan statistik agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna data statistik yang akurat dan semakin beragam. Peran Direktorat PMSS dalam implementasi SDI menjadi sangat penting. SDI membutuhkan standarisasi dalam bentuk petunjuk teknis yang baku terkait penyelenggaraan kegiatan statistik baik dalam hal konsep, definisi, metode penyusunan kerangka sampel, dan penarikan sampel.

Potensi yang dimiliki Direktorat PMSS untuk mencapai sasaran yang ditetapkan adalah:

- a. SDM yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian sasaran.
- b. Berkembangnya teknologi informasi berbasis geospasial membuka potensi yang besar dalam pengembangan metodologi sensus dan survei.
- c. Tersedianya sistem aplikasi yang dibangun dan dipelihara oleh Direktorat PMSS.
- d. Peningkatan permintaan pembinaan dan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei.

Pengembangan di bidang metodologi tersebut tidak luput dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi, baik yang berakibat pada kegiatan teknis maupun administrasi. Secara umum permasalahan tersebut antara lain:

- a. Terbatasnya sarana (laptop, koneksi internet, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia).
- b. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas pegawai di bidang metodologi sensus dan survei yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang padat pada jam kerja.
- c. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektoral belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektoral.
- d. Kendala pemutakhiran wilayah kerja statistik seperti keterlambatan pengiriman peta dari daerah, permasalahan batas antar provinsi, pemekaran wilayah, serta kendala teknis terkait pengolahan peta dan titik bangunan.
- e. Keterlambatan pengolahan data, keterbatasan akses data, dan perubahan proses bisnis pada waktu menjelang kegiatan menghambat dalam penyusunan metodologi dan daftar sampel.

- f. Belum tersedianya payung hukum integrasi data SBR baik internal maupun eksternal.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SAKIP, Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan yang dihadapi Direktorat PMSS; serta sistematika penyajian laporan.
- BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis; Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PMSS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PMSS Tahun 2023.
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi analisis pencapaian kinerja tahun 2023; perbandingan capaian kinerja total tahun 2023 sampai dengan 2020; realisasi kinerja per IKU dari tahun 2023 sampai dengan tahun pertama periode Renstra (2020); realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target Renstra tahun 2023; Realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target akhir Renstra 2024; analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja; prestasi dan inovasi Satker tahun 2023; dan realisasi dan efisiensi anggaran tahun 2023.
- BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan rencana tindak lanjut untuk tahun berikutnya.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

2.1.1. Visi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Visi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Direktorat PMSS) adalah “penyedia metodologi sensus dan survei yang andal untuk mendukung Satu Data Indonesia dan penguatan Sistem Statistik Nasional untuk Indonesia maju” untuk mendukung visi Kedeputan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (Deputi Bidang MIS) yaitu “penyedia metodologi, sistem informasi, dan diseminasi dalam penyediaan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju”.

Rumusan visi tersebut merupakan komitmen bersama, mengingat besar dan kompleksnya permasalahan pembangunan statistik yang maju dan mampu menghasilkan *official statistics* yang dibutuhkan masyarakat dan dapat dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh *Nasional Statistics Office* (NSO) negara lain dan penyediaan pelayanan prima di bidang statistik serta dukungan infrastruktur dan pengintegrasian sistem statistik. Sehingga, di masa mendatang BPS dapat menjadi rujukan perstatistikan di dunia internasional. Perlu juga digarispawahi pencapaian visi memerlukan kecermatan dan kematangan dalam perencanaan program dan kegiatan tahunan yang fokus pada skala prioritas tujuan organisasi yang harus dicapai. Sehingga, pengukuran kinerja pun harus dapat ditentukan secara tepat agar dapat menjadi evaluasi pencapaian target kinerja.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Deputi Bidang MIS yang menggambarkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan demi pencapaian visi. Misi dari Deputi Bidang MIS tahun 2020–2024 dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas, baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI);
- b. Membina K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik; dan
- c. Meningkatkan layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional.

2.1.2. Misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Misi yang ditetapkan Direktorat PMSS menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Menyediakan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI), dan
- b. Membina K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei.

2.1.3. Tujuan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Tujuan Direktorat PMSS, seperti yang tercantum pada Renstra Kedepuyan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2020-2024, adalah:

Tujuan 1: Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas.

Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data.

2.1.4. Sasaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Sasaran strategis Direktorat PMSS dalam mendukung SSN yang memenuhi standar internasional dan mewujudkan SDI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas” adalah:
 1. Tersedianya metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas;
 2. Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran;
 3. Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data;
 4. Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas;
- b. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data”, adalah:
 1. Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei;

2. Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam metodologi sensus dan survei.

2.2. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024

Sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Direktorat PMSS mengacu pada Renstra BPS 2020-2024 yang sudah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2020-2024. Renstra BPS merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Renstra Direktorat PMSS dapat dilihat pada Lampiran 5.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Pada periode 2023, telah ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai oleh Direktorat PMSS yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai unit kerja BPS. Pada tabel di bawah ini ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Direktorat PMSS.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas			
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persen	100
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persen	100
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikasi	6
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persen	100
Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data.			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3

Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei merupakan perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan mau pun kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PMSS selama satu tahun anggaran 2023 melalui program-program kegiatan diuraikan pada bab ini.

3.1. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja 2023 merupakan pencapaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PMSS dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian tersebut diukur melalui indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2023. Konsep, definisi dan metode penghitungan dapat dilihat pada Lampiran 6.

Secara umum, kinerja Direktorat PMSS menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian sasaran sebesar 100 persen selama tahun 2023. Seperti disajikan pada Tabel 3.1, target yang ditetapkan pada semua sasaran strategis dapat tercapai. Dengan demikian, selama kurun waktu satu tahun, sasaran strategis telah berhasil dilaksanakan dengan pencapaian yang baik.

3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Direktorat PMSS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas					
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persen	100	100	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persen	100	100	100
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikasi/ Laporan	6	6	100
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persen	100	100	100
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data					
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100	100	100
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100	100	100

Meskipun demikian, di setiap sasaran masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, diperlukan strategi untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi. Berikut ini diuraikan permasalahan yang ditemui dan strategi untuk mengatasi masalah pada setiap indikator.

Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas

Indikator 1: Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas

Keberhasilan Direktorat PMSS dalam mencapai indikator persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas tidak terlepas dari keterkaitan dengan indikator lain. Selama tahun 2023, Direktorat PMSS berhasil menyelesaikan 49 dokumen desain *sampling* dan 64 dokumen pengukuran sampel. Semua dokumen yang diselesaikan mencakup desain *sampling*, termasuk alokasi sampel dan pengukuran sampel dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak luar Direktorat PMSS, baik dari internal BPS (Penanggung Jawab Kegiatan/PJK BPS) maupun dari eksternal BPS (Kementerian/ Lembaga di luar BPS). Dengan demikian, pencapaian indikator persentase jumlah dokumen desain *sampling* sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas pada tahun 2023 berhasil mencapai 100 persen.

Dokumen desain sensus dan survei merupakan naskah desain sensus maupun survei yang disiapkan untuk kegiatan sensus atau survei di bidang statistik sosial, bidang statistik produksi, bidang statistik distribusi dan jasa, serta bidang untuk mendukung perhitungan neraca nasional. Isi dalam dokumen desain ini mencakup namun tidak terbatas pada jumlah dan alokasi sampel, metode dan prosedur pengambilan sampel, prosedur penghitungan penimbang (*sampling weight*), prosedur penghitungan kesalahan *sampling* (*sampling error*), dan prosedur pengumpulan data. Sedangkan dokumen pengukuran sampel merupakan dokumen yang berisi hasil penghitungan minimum sampel sesuai dengan kesepakatan antara Direktorat PMSS dan Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) sensus atau survei terkait. Prosedur yang biasanya dilakukan dalam penghitungan sampel adalah Direktorat PMSS memberikan beberapa pilihan sampel sesuai dengan kebutuhan PJK, seperti level estimasi, cakupan kegiatan, dan informasi lainnya. Dari pilihan yang disediakan oleh Direktorat PMSS, PJK kemudian memilih salah satu opsi yang sesuai dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, seperti anggaran, kebutuhan dari pihak eksternal, dan lain-lain.

Capaian sebesar 100 persen pada indikator 1 dipengaruhi oleh realisasi capaian dokumen yang disediakan Direktorat PMSS melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Desain metodologi yang dihasilkan pada tahun 2023 sebanyak 49 dokumen dari target awal sebanyak 45 dokumen. Sedangkan, dokumen pengukuran sampel yang dihasilkan sebanyak 64 dokumen dari target awal 27 dokumen. Hal ini dikarenakan ada tambahan permintaan rancangan survei pada tahun berjalan baik yang berasal dari PJK BPS maupun kementerian/lembaga lain. Adapun permintaan desain *sampling* dari Kementerian/Lembaga lain merupakan bagian dari pembinaan dan kerjasama kegiatan

statistik bidang metodologi sensus dan survei yang merupakan sasaran kinerja dari Direktorat PMSS. Kegiatan kerja sama pada umumnya menggunakan anggaran dari kementerian/lembaga yang bersangkutan dengan mekanisme kerjasama swakelola tipe I. Sebagai pembina statistik sektoral yang bertanggung jawab atas bidang metodologi sensus dan survei, hal ini merupakan salah satu kewajiban di Direktorat PMSS.

Tabel 3.2. Nama Survei Yang Telah Diselesaikan Penyusunan Desain Sampling dan Pengukuran Sampel Pada Tahun 2023

Penyusunan Desain Sampling		Pengukuran Sampel	
No	Nama Survei	No	Nama Survei
1.	SUB-KSA Bulan Maret-April (alokasi sampel)	1.	Survei Pertanian Tanaman Pangan/Survei Ubinan 2025
2.	SUB-KSA Bulan Mei-Juni (alokasi sampel)	2.	Survei Struktur Ongkos Usaha Hortikultura 2025 (SOUH)
3.	SUB-KSA Bulan Juli-Agustus (alokasi sampel)	3.	Survei Komoditas Strategis Perkebunan 2025 Komoditas Kelapa Sawit
4.	SUB-KSA Bulan September-Oktober (alokasi sampel)	4.	Survei Hortikultura Potensi 2025 (SHOPI)
5.	SUB-KSA Bulan November-Desember (alokasi sampel)	5.	Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA-Padi dan KSA-Jagung) 2025
6.	Survei Komstrat Perkebunan (Lada dan Kelapa) 2023	6.	Survei Perusahaan Perkebunan Bulanan (Sedapp Online) 2025
7.	Survei Ubinan Palawija 2023	7.	Survei Perusahaan Tahunan (SKB Tahunan) 2025
8.	Uji Coba Survei Produksi dan Lingkungan Pertanian 2023	8.	Updating DPP dan DUTL 2025
9.	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2023	9.	Pendataan Statistik Tanaman Bawang dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) 2025
10.	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Kabupaten Badung 2023 (Weighting)	10.	Survei Pertanian Hortikultura 2025
11.	Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (SPDT) IHPB 2023	11.	Survei Perusahaan Hortikultura 2025
12.	Survei Biaya Hidup Perkotaan dan Pedesaan 2022	12.	Pendataan Lengkap Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP TPI) 2025
13.	Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2023	13.	Pendataan Lengkap Pendaratan Ikan Tradisional (PIT) 2025

Penyusunan Desain Sampling		Pengukuran Sampel	
No	Nama Survei	No	Nama Survei
14.	Survei Komoditas Spesifik (SVK) 2023	14.	Pendataan Lengkap Perusahaan Budidaya Ikan (LTB) 2025
15.	Survei Tarif Sewa/Kontrak Rumah, Upah Asisten Rumah Tangga dan Upah Baby Sitter dan Uang Sekolah (STRABS) 2023	15.	Pendataan Lengkap Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP) 2025
16.	Survei Jasa Akomodasi Tahunan (VHTL) 2023	16.	Laporan Tahunan Perusahaan Sapi Perah (LTS) 2025
17.	Survei Daya Tarik Wisata (VDTW) 2023	17.	Laporan Tahunan Perusahaan Ternak Besar dan Kecil (LTT) 2025
18.	Survei Penyedia Makan/Minum (VREST UMB) 2023	18.	Laporan Tahunan Perusahaan Ternak Unggas (LTU) 2025
19.	Survei Karakteristik Usaha (BCS) 2023	19.	Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB) 2025
20.	Survei Statistik Keuangan Desa/Nagari (K3) 2023	20.	Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan (DKT) 2025
21.	Survei Ecommerce 2023	21.	Survei Perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar 2025
22.	SLK (Survei Koperasi Simpan Pinjam dan Valas) 2023	22.	Survei Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2025
23.	Passenger Exit Survey (PES) 2023	23.	Survei Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) 2025
24.	Survei Digital Wisatawan Nasional (Outbound)2023	24.	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2025
25.	Survei Digital Wisatawan Nusantara 2023	25.	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2025
26.	Survei Perdagangan Antar Wilayah (PAW) 2023	26.	Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025
27.	Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan 2023	27.	Survei Nilai Tukar Petani (NTP) 2024
28.	Ujicoba Survei Integrasi Statistik Perdagangan Dalam Negeri 2023	28.	Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2025
29.	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2023	29.	Survei Harga Produsen Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan & Penggalian (HP) 2025
30.	Survei Profil Pasar 2023	30.	Survei Harga Produsen Sektor Jasa (HPJ) 2025
31.	Ujicoba Survei Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Jasa Lainnya 2023	31.	Survei Harga Produsen Sektor Pertanian (HPT) 2025

Penyusunan Desain Sampling		Pengukuran Sampel	
No	Nama Survei	No	Nama Survei
32.	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2023	32.	Survei Karakterik Usaha (BCS) 2023
33.	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023	33.	Survei Wisatawan Nasional 2023
34.	Survei Komuter 2023	34.	Passenger Exit Survey (PES) 2025
35.	Studi EA SLS Sakernas Agustus 2023	35.	Survei Digital Wisatawan Nusantara 2025
36.	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024	36.	Survei Digital Wisatawan Nasional 2025
37.	Survei IMK Triwulanan 2023	37.	Survei Karakterik Usaha (BCS) 2025
38.	Survei IMK Tahunan 2023	38.	Survei K3 2025
39.	Survei Konstruksi Tahunan 2022	39.	Survei Ecommerce 2025
40.	Survei Konstruksi triwulanan 2023	40.	Survei Koperasi Simpan Pinjam 2025
41.	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023	41.	Survei Lembaga Keuangan Pedagang Valuta Asing 2025
42.	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024	42.	Survei Penimbang Wisatawan Nusantara 2025
43.	Seruti 2023	43.	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2025
44.	NTA (National Transfer Account) 2023	44.	Survei Perdagangan Antar Wilayah (PAW) 2025
45.	PES ST2023	45.	Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan 2025
46.	SKTNP Barang 2024	46.	Survei Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan 2025
47.	SKTNP Jasa 2024	47.	Sakernas Februari 2025
48.	Survei Stok Beras Akhir Tahun 2023	48.	Sakernas Agustus 2025
49.	Survei Stok Jagung Akhir Tahun 2023	49.	Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2025
		50.	Survei Konstruksi Tahunan 2024 (pelaksanaan 2025)
		51.	Survei Konstruksi triwulanan 2025
		52.	Survei IMK Triwulanan 2025
		53.	Survei IMK Tahunan 2025
		54.	Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur 2025
		55.	Survei IBS Bulanan 2025
		56.	Survei Tahunan Usaha Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi (GALIAN-URT)

Penyusunan Desain Sampling		Pengukuran Sampel	
No	Nama Survei	No	Nama Survei
		57.	Survei Captive Power 2025
		58.	Susenas Maret 2025
		59.	Susenas September 2025
		60.	Seruti 2025
		61.	SKTNP Barang 2025
		62.	SKTNP Jasa 2025
		63.	SKNP 2025
		64.	SEEA 2025

Kendala dan tantangan yang dihadapi adalah:

1. Untuk Survei yang memerlukan perhitungan ulang minimum sampel, data populasi final yang bersumber dari data PJK telat didapat sehingga penghitungan minimum sampel dilakukan secara berulang dan belum adanya format standar data populasi dari PJK.
2. Terdapat SOP dari desain yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal pada saat pelaksanaan lapangan dan terdapat kendala dalam implementasi beban kerja petugas lapangan.
3. Pada perhitungan minimum sampel dan alokasi sampel, terdapat perubahan cakupan yang disampaikan oleh PJK BPS karena adanya keterbatasan atau perubahan anggaran.
4. Terbatasnya akses data pada hasil pendataan lengkap/Sensus sehingga membatasi pegawai untuk melakukan eksplorasi data terkait penyusunan desain survei.
5. Terbatasnya sarana (laptop, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia).
6. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai di bidang metodologi sensus dan survei yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang padat pada jam kerja.

Strategi untuk mengatasi masalah:

1. Melakukan komunikasi dengan PJK terkait percepatan penyampaian data serta membuat *template* untuk raw data di kegiatan selanjutnya supaya kegiatan perhitungan minimum sampel dapat dilakukan dengan lebih cepat.
2. Melakukan penyesuaian SOP lapangan dalam implementasi desain metodologi dan melakukan penyesuaian beban petugas sesuai dengan kendala yang dialami di lapangan dengan menyertakan berita acara sebagai laporan hasil penyesuaian sop dan beban petugas.

3. Melakukan komunikasi dengan PJK terkait keterbatasan anggaran dan menyampaikan perlunya beragam pilihan cakupan yang disiapkan oleh PJK untuk kemudian dilakukan perhitungan ulang minimum sampel dengan beragam pilihan oleh Tim PMSS.
4. Melakukan koordinasi dengan Direktorat SIS untuk memenuhi kebutuhan dan pelaksanaan eksplorasi desain survei serta menyiapkan kode program (*syntax*) terkait eksplorasi untuk dijalankan oleh Direktorat SIS yang memiliki akses.
5. Adanya keterbatasan sarana memaksa pegawai menggunakan laptop pribadi untuk pengayaan di bidang desain sensus dan survei.
6. Pengaturan pembagian tugas kepada SDM disesuaikan dengan beban dan kemampuannya SDM, serta tenggat waktu yang ditentukan.
7. Pengayaan dan peningkatan kapasitas SDM dilakukan secara *learning by doing* dan juga di luar jam kerja.

Indikator 2: Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran

Tahun 2023, penyusunan dokumen kerangka sampel survei yang mutakhir diperoleh sebanyak 63 dokumen atau terealisasi 100 persen dari target yang direncanakan sebanyak 54 dokumen. Penyusunan dokumen tersebut meliputi penyusunan kerangka sampel survei bidang statistik sosial, bidang statistik produksi, bidang statistik distribusi dan jasa, serta bidang statistik neraca.

Tabel 3.3. Daftar Survei Bidang Statistik Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, serta Neraca Tahun 2023

No.	Nama Survei		No.	Nama Survei
(1)	(2)		(1)	(2)
1.	Survei Komstrat Perkebunan (Tebu dan Lada) 2023		28.	Survei Ecommerce 2023
2.	Survei Ubinan Palawija 2023 Subround 1		29.	Survei Perdagangan Antar Wilayah (PAW) 2023
3.	Survei Ubinan Palawija 2023 Subround 2		30.	Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan 2023
4.	Survei Ubinan Palawija 2023 Subround 3		31.	Ujicoba Survei Integrasi Statistik Perdagangan Dalam Negeri 2023

5.	SUB-KSA Padi Bulan Maret-April 2023		32.	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2023
6.	SUB-KSA Padi Bulan Mei-Juni 2023		33.	Ujicoba Survei Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Jasa Lainnya 2023
7.	SUB-KSA Padi Bulan Juli-Agustus 2023		34.	Survei Profil Pasar 2023
8.	SUB-KSA Padi Bulan September-Oktober 2023		35.	Sakernas Februari 2023
9.	SUB-KSA Padi Bulan November-Desember 2023		36.	Sakernas Agustus 2023
10.	SUB-KSA Padi Bulan Januari-Februari 2023		37.	Sakernas 2024
11.	Ujicoba Survei Proling 2023		38.	Survei Komuter 2023
12.	SPAK 2023		39.	Studi EA SLS Sakernas Agustus 2023
13.	Penyipan Prelist FKP Regsosek 2023		40.	Survei konstruksi Tahunan 2022 (pelaksanaan 2023)
14.	Ujicoba Podes 2024		41.	Survei Konstruksi triwulanan 2023
15.	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2023		42.	Survei Konstruksi Perorangan 2023
16.	Survei Komoditas Spesifik 2023		43.	Survei IMK Triwulanan 2023
17.	Survei Kesejahteraan Petani (SKP 2023)		44.	Survei IMK Tahunan 2023
18.	SPDT IHPB 2023		45.	Susenas Maret 2023
19.	STRABS 2023		46.	Susenas Maret 2024
20.	Penyiapan Prelist ST2023		47.	Ujicoba EA SLS Susenas 2023
21.	SDKI 2023		48.	Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024
22.	Survei Jasa Akomodasi Tahunan (VHTL) - [Sensus] 2023		49.	Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (Seruti) 2023
23.	Survei Daya Tarik Wisata (VDTW) - [Sensus] 2023		50.	Indepth Study NTA (National Transfer Account) 2023

24.	Survei Penyedia Makan/Minum (VREST UMB) [Sensus] 2023		51.	PES ST2023
25.	Survei Karakterik Usaha (BCS) 2023		52.	Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) Barang 2024
26.	Survei K3 2023		53.	Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) Jasa 2024
27.	Survei Lembaga Keuangan dan Valas 2023			

Kegiatan penyusunan kerangka sampel sudah dilakukan sesuai *timeline* yang ditentukan. Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Karena kebutuhan yang mendesak terjadi perubahan metodologi pada waktu menjelang kegiatan, sehingga perlu disusun ulang tahapan penyiapan sampel mulai dari kerangka sampel dan daftar sampelnya.
2. Masih banyak diterima pengajuan penggantian sampel hingga melebihi batas waktu pengajuan yang ditetapkan, sehingga sampel final untuk beberapa wilayah menjadi mundur.
3. Keterbatasan akses pada hasil kegiatan sebelumnya menghambat updating kerangka sampel, sehingga sampel usaha yang sudah tutup terpilih kembali di kegiatan selanjutnya.
4. Sebagian wilayah sampel terpilih pada kegiatan Ubinan mengalami terlewat panen karena siklus tanam padi yang lebih singkat, sehingga menyebabkan penggantian/penambahan sampel.
5. Pada beberapa kegiatan, naskah metodologi dan alokasi dikirim berdekatan dengan waktu menjelang kegiatan lapangan, sehingga waktu untuk penyusunan kerangka sampel dan daftar sampelnya sangat singkat.
6. Terdapat keterlambatan pengolahan data, sementara data tersebut dibutuhkan untuk prelist kegiatan selanjutnya.
7. Terdapat kesulitan dalam melakukan pencacahan pada wilayah remote dan wilayah forced majeure.
8. Terdapat keterbatasan akses data Pendataan Awal Regsosek 2022, ST2023, dan PL-KUMKM 2023 sementara data tersebut dibutuhkan untuk penyusunan kerangka sampel.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala terkait penyiapan kerangka sampel, daftar sampel, dan penggantian sampel:

- Melakukan perbaikan kerangka sampel.
- Mendiskusikan strategi penyelesaian pengolahan mendatang, perihal hasil pemutakhiran dengan Tim SIS guna memperbaiki ketepatan penerimaan hasil pemutakhiran dari BPS daerah untuk segera diproses kembali dalam mengupdate kerangka sampel dan penyediaan daftar pemutakhiran kegiatan berikutnya.
- Bekerja sama dengan Tim SIS untuk menjalankan program (*source code*) stratifikasi dan pengambilan sampel.
- Memanfaatkan satuan lingkungan setempat (SLS) sebagai enumeration area (EA), sesuai EA pada kegiatan ST2023.
- Berkoordinasi dan melakukan evaluasi dengan BPS daerah terkait penggantian sampel.

BPS mulai membangun *Statistical Business Register* (SBR) yang bertujuan untuk mengintegrasikan data direktori seluruh PJK dan K/L/D/I secara terpusat ke dalam satu sistem. SBR dibangun dengan konsep dan definisi unit statistik yang baku mengikuti *System of National Account (SNA) 2008*. SBR merupakan daftar unit ekonomi yang terstruktur dan termutakhirkan secara reguler dalam suatu wilayah, yang dipelihara oleh institusi statistik untuk tujuan statistik. SBR mempunyai peran penting dalam memproduksi statistik ekonomi. SBR berfungsi menyediakan populasi unit statistik ekonomi sebagai kerangka sampel untuk survei-survei ekonomi. SBR mengintegrasikan data dari administratif data dan sumber lain (*sensus/survei, profiling, dll*) sehingga dapat digunakan untuk menyusun demografi bisnis.

Berdasarkan arahan Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, dibentuklah Tim Kerja Pengembangan Register Usaha (PRU) sebagai tim kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SBR. Pembentukan Tim diharapkan dapat membuat jejak SBR di BPS menjadi lebih nyata. Hal ini telah dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pemanfaatan data SBR serta keberhasilan akuisisi data administrasi dari beberapa sumber data ke dalam SBR. Adapun *output* dan kegiatan SBR selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Integrasi dan Pemutakhiran Data SBR (*Input* SBR)

Pada tahun 2023, SBR melakukan integrasi dan pemutakhiran data dengan mengumpulkan data administrasi dari Kementerian/Lembaga dan data dari seluruh PJK di BPS hasil *updating* perusahaan dan *survey feedback* yang telah dilakukan oleh PJK selama tahun 2023. Pengumpulan data administrasi dari Kementerian/Lembaga dilakukan melalui Surat Permohonan Permintaan Data dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sedangkan data dari PJK dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Permohonan Permintaan Data dan link upload data ke seluruh PJK di BPS.

Kendala yang terjadi dalam proses ini adalah setiap *database* dari Kementerian/Lembaga dan PJK memiliki struktur yang berbeda - beda sehingga tidak dapat langsung di lakukan integrasi dengan *database* SBR. Sebelum melakukan integrasi data administrasi dan *database* Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) dengan *database* SBR, perlu dilakukan identifikasi variabel-variabel yang ada di *database* Kementerian/Lembaga dan Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) kemudian mencocokkan variabel tersebut ke dalam variabel SBR. Alternatif lain yang dapat dilakukan di masa depan adalah BPS dan Kementerian/Lembaga memiliki satu struktur *database* yang konsisten untuk variabel - variabel yang memiliki konsep dan definisi yang sama pada setiap kegiatan survei. Sehingga ketika terjadi pemutakhiran database, maka hal yang dapat dilakukan adalah membuat *query* untuk mengambil variabel - variabel yang dibutuhkan oleh SBR dan melakukan pemutakhiran di database SBR.

2. **Groundcheck SBR dalam rangka *Quality Improvement Survey (QIS)***

Di tahun 2023 dilakukan kegiatan Groundcheck SBR dalam rangka *Quality Improvement Survey (QIS)*. Groundcheck SBR adalah kegiatan pemutakhiran data dengan cara melakukan pengecekan lapangan untuk meningkatkan kualitas data SBR. Maksud dan Tujuan dilaksanakannya kegiatan *groundcheck data SBR* dalam rangka *Quality Improvement Survey (QIS)* adalah:

- a. Memutakhirkan data usaha/perusahaan yang kemungkinan belum pernah dimutakhirkan pada kegiatan *updating* atau survei BPS
- b. Membersihkan data SBR dari usaha/perusahaan yang tidak aktif dan tidak beroperasi lagi
- c. Melengkapi isian variabel-variabel yang masih kosong.
- d. Menghilangkan duplikasi data.

Kegiatan *groundcheck data SBR 2023* dalam rangka *Quality Improvement Survey (QIS)* diharapkan dapat meningkatkan kualitas data SBR dalam menyediakan database usaha/ perusahaan yang terkini untuk penyusunan kerangka induk survei ekonomi dan data statistik unit bisnis.

Daftar variabel yang dimutakhirkan pada kegiatan Groundcheck SBR adalah:

- **Identitas Perusahaan**

ID SBR, Nama Usaha, Nama Komersial, Unit Statistik, Kondisi Usaha/Perusahaan, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Alamat Lengkap Usaha/Perusahaan, No. Telp, Faksimili, *Email*, *Website*, *Geo Tagging*

- **Karakteristik Perusahaan**

Kegiatan Utama, Produk Utama, Sektor Institusi, Status Kepemilikan, Bentuk Badan Usaha, Kepemilikan Laporan Keuangan, Tahun Berdiri, Tahun Mulai Beroperasi, Nomor Induk Berusaha (NIB), Jaringan Usaha

- **Identitas Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan**

Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Jenis Kelamin Penanggung Jawab, Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Status Pengusaha, Jabatan Pemilik/Penanggung Jawab, Status Penanaman Modal

- **Indikator Ekonomi**

Nilai Produksi, Nilai Pendapatan, Nilai Pengeluaran, Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA), Nilai Pengeluaran untuk Upah dan Gaji TKI dan TKA, Total Aset, Jumlah Kamar (Khusus Sektor Pariwisata, Kategori I)

3. Profiling Top 100 Perusahaan

Profiling Top 100 Perusahaan digunakan untuk penyusunan profil perusahaan yang merupakan metode untuk menganalisis struktur hukum, operasional, dan akuntansi dari sebuah kelompok perusahaan di tingkat nasional dan global, dalam rangka membangun unit statistik dalam group, hubungannya, dan struktur yang paling efisien untuk pengumpulan data statistik.

Top 100 Perusahaan yang diprofiling adalah 100 perusahaan yang mempunyai income terbesar selama tahun 2022 menurut majalah Fortune. Sumber data yang digunakan untuk kegiatan profiling adalah hasil penelusuran laporan tahunan, laporan keuangan, informasi profil perusahaan dan jaringan perusahaan dari sumber resmi internet dan web resmi perusahaan atau grup perusahaan kondisi tahun 2022.

Tujuan dari profiling untuk memperoleh profil perusahaan yang berskala usaha menengah dan besar di Indonesia baik milik negara maupun swasta dan menggambarkan hubungan/ relationship dalam grup sesuai konsep pengklasifikasian unit statistik grup enterprise, enterprise, establishment dan unit penunjang. Selain itu, tujuan lain adalah untuk mendapatkan dan melengkapi informasi perusahaan data direktori perusahaan sesuai kondisi terkini.

4. Pengembangan FRS/SBR Milestone 3

Sistem SBR merupakan sistem yang memfasilitasi pengelolaan data Bisnis dan mendukung penyediaan kerangka bisnis yang termutakhirkan untuk mendukung pelaksanaan Sensus dan Survei di BPS. Fokus pada milestone 3 adalah terkait integrasi data dan pembangunan aplikasi Matcha (*Matching* dan *Assessment*) sebagai salah satu

modul/bagian dari FRS. Fitur-fitur pada aplikasi Matcha ini masih akan terus melalui proses perbaikan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan sistem. Beberapa fitur yang dikembangkan di tahun 2023 diantaranya adalah fitur pengelolaan data duplikat dan fitur perbaikan kesesuaian antara kode KBLI dengan aktivitas atau nama perusahaan.

5. Pemanfaatan SBR

SBR memberikan pelayanan permintaan data dari beberapa unit kerja internal untuk keperluan penyiapan kerangka survei di antaranya yaitu :

- a. Sensus Pertanian 2023
- b. Groundcheck QIS-SBR
- c. Survei Stok Beras Akhir Tahun (SBAT) dan Stok Jagung Akhir Tahun (SJAT)
- d. Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PL-KUMKM)
- e. Survei Captive Power 2023
- f. SKU (Survei Karakteristik Usaha)
- g. UMKM – Ekspor
- h. SKTNP Barang dan Jasa 2024
- i. SEEA 2023
- j. Perhitungan iPlan dan Penentuan Sampel minimum.

6. Kerjasama yang Dilakukan *Statistical Business Register*

Dalam rangka pemanfaatan data administrasi sebagai salah satu sumber data SBR telah dilakukan koordinasi dengan beberapa K/L, antara lain:

1) Permintaan Data OSS BKPM

Menindaklanjuti MoU antara BPS dan BKPM Nomor: 19/P/A.1/2021 dan 10/KS.M/06-IX/2021 tanggal 6 September 2021 dan draft PKS antara BPS dan BKPM, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei telah bersurat kepada Direktorat Data dan Informasi Kementerian Investasi/BKPM dengan Nomor: B-1051/03100/VS.020/11/2022 tanggal 30 November 2022 perihal permohonan data direktori perusahaan yang melakukan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS). Pada tanggal 13 November 2023 juga telah mengundang Direktur Data dan Informasi sebagai Narasumber dalam kegiatan Evaluasi Register Usaha sekaligus untuk melakukan konfirmasi permohonan data direktori, namun masih belum mendapatkan *feedback* karena belum adanya PKS.

2) Permintaan Data SIINas Kementerian Perindustrian

Berbekal MoU antara BPS dan Kementerian Perindustrian Nomor: 283.1/M-IND/5/2018 dan 07/KS.M/07-V/2018 tanggal 7 Mei 2018, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei telah bersurat kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian dengan Nomor: B-1054/03100/VS.020/11/2022 tanggal 30 November 2022 perihal permohonan data direktori perusahaan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan telah diterima feedback berupa data yang dibutuhkan melalui surat no: 9/SJ-IND.7/IND/I/2023 13 Januari 2023.

3) Koordinasi dengan LKPP

Menindaklanjuti MoU antara BPS dan LKPP Nomor: 17 Tahun 2019 dan 13/KS.M/03-IX/2019 tanggal 3 September 2019 dan PKS antara BPS dan LKPP Nomor: 5 dan 07.13.19/KS.P/05-IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang pemanfaatan KBLI dan perolehan data perusahaan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah untuk SBR, Direktorat Pengembangan Metodologi telah melakukan koordinasi dengan LKPP. Data sudah kami terima melalui direktorat statistik industri pada tanggal 7 Maret 2023.

4) Koordinasi dengan Kementerian KUKM

Berbekal MoU antara BPS dan Kementerian KUKM Nomor: 11/KB/M.KUKM/V/2017 dan 04/KS.M/23-V/2017 tanggal 23 Mei 2017, pada tahun 2022 telah ditandatangani PKS antara BPS dan Kementerian KUKM Nomor: 34/NKB/SM/X/2022 dan 33.01.22/HK.610/PKS/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang percepatan pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan penyusunan indikator makro. Salah satu isi dari PKS tersebut adalah pihak kementerian KUKM berkewajiban membagikan data mikro hasil PL-KUMKM kepada BPS. Namun sampai akhir tahun 2023 data hasil PL-KUMKM belum diterima.

Rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan SBR pada tahun 2023 ini dirangkum dalam Laporan *Statistical Business Register 2023*.

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam aktivitas penyusunan dan pengembangan SBR:

1. Sumber Daya Manusia

- Terbatasnya SDM teknologi informasi yang dapat mengembangkan dan membangun sistem berbasis *website/aplikasi* guna mengakomodasi kebutuhan dari penerapan atas SBR agar berjalan efektif dan efisien; saat ini masih mengandalkan pengembang sistem (*developer*) Direktorat PMSS yang tidak hanya mengerjakan sistem tetapi juga

mengerjakan proses bisnis rutin terkait pengembangan konten/pemeliharaan SBR.

Hal ini ke depan

2. Koordinasi dan Sosialisasi

- Belum berjalannya koordinasi di internal BPS sendiri maupun BPS dengan K/L dalam integrasi data SBR.
- Terbatasnya sisi anggaran dalam melakukan pengembangan SBR.

3. Volume/ beban pekerjaan

- Meningkatnya sumber data untuk mengupdate SBR baik internal maupun eksternal untuk diintegrasikan dan dimutakhirkan secara berkelanjutan.
- Meningkatnya permintaan data SBR untuk kerangka induk (*master frame*) survei berbasis perusahaan/usaha secara berkelanjutan.
- Kebutuhan pengembangan dan penyusunan metodologi integrasi data SBR yang belum memiliki proses bisnis yang efisien dan sarana yang memadai untuk dapat memberikan output yang berkualitas dan mendukung berbagai kebutuhan berbagai pengguna termasuk kebutuhan data baru terkait isu-isu dampak fenomena statistik terkait pandemi, digitalisasi, globalisasi, dan *sustainability*.

4. Konten dan *Support Data*

- Pada SBR, masih terdapat isian variabel esensial SBR pada direktori usaha/perusahaan PJK yang masih kosong/tidak lengkap.
- Terdapat inkonsistensi antara isian kode KBLI dengan deskripsi kegiatan
- Diperlukan pengecekan duplikasi data dalam basis data SBR secara berkala

5. Payung Hukum

Dibutuhkan payung hukum dalam integrasi data SBR baik internal BPS dan eksternal (Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi)

Indikator 3: Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data

Pada tahun 2023, Direktorat PMSS telah mampu menghasilkan 6 output berupa dokumen laporan/publikasi/aktivitas/Perban terkait fungsi pengembangan standarisasi dan klasifikasi statistik yaitu Laporan kegiatan pembinaan klasifikasi statistik, Laporan konsultasi klasifikasi statistik, Laporan studi evaluasi klasifikasi desa perkotaan/perdesaan, Laporan penyusunan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) Pertanian ST2023, Laporan penyusunan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), serta Laporan pembinaan Standar Data Statistik. Adapun rincian capaian output tersebut adalah:

1. Laporan Pembinaan Klasifikasi Statistik 2023



Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya Pasal 17 ayat (2), BPS memiliki tugas untuk membangun konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik dalam mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional. Di BPS, penyusunan klasifikasi statistik dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Dalam kaitan BPS sebagai Pembina Data statistik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, BPS juga melakukan pembinaan terkait dengan klasifikasi statistik.

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei juga melakukan penyempurnaan klasifikasi-klasifikasi yang telah dibakukan secara berkala. Hal ini sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin beragam. Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan antara lain melakukan pemantauan tentang kondisi perubahan kegiatan ekonomi yang ada, menerima masukan dari unit kerja terkait, serta mengintensifkan pembinaan klasifikasi statistik baik kepada internal BPS maupun instansi eksternal untuk meningkatkan pengenalan dan pemahaman terkait klasifikasi statistik.

Selama tahun 2023, BPS melakukan pembinaan klasifikasi statistik sebanyak 96 kegiatan. Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi 90 kegiatan pembinaan untuk 23 Kementerian/Lembaga berbeda di tingkat pusat, 3 kegiatan pembinaan untuk 3 Instansi di tingkat daerah, serta 3 pembinaan untuk 3 instansi yang berupa rekomendasi secara tertulis. Walaupun demikian, pembinaan klasifikasi statistik yang telah dilakukan masih mengandalkan inisiatif dari eksternal Badan Pusat Statistik.

Sebagai rencana tindak lanjut, pada tahun 2024 ini BPS menargetkan pembinaan klasifikasi statistik untuk beberapa provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya kegiatan penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) di tahun 2025.

2. Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik Tahun 2023

Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik disusun berdasarkan pengumpulan laporan konsultasi klasifikasi yang dilakukan pada Ruang Pengembangan Standardisasi dan

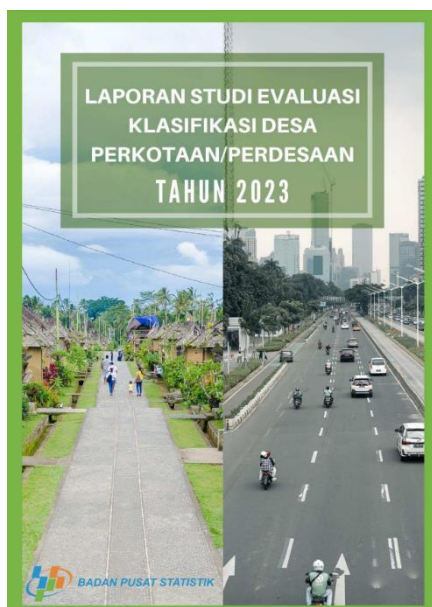
Klasifikasi Statistik (PSKS) dalam rangka dokumentasi laporan untuk pengembangan klasifikasi di masa yang akan datang. Laporan tersebut dilakukan oleh tim yang berbeda setiap harinya dalam sepekan. Tim-tim yang dimaksud memberikan konsultasi melalui media yang telah disediakan kepada pengguna. Bentuk media konsultasi dapat melalui:

1. Sistem Informasi Layanan Statistik (SILASTIK)
2. Telepon;
3. Kunjungan; dan
4. Media lainnya, seperti *Email*, *WhatsApp* (WA), surat dan lainnya.



Kegiatan konsultasi klasifikasi statistik menggambarkan kebutuhan kode klasifikasi statistik dari pengguna. Pengguna menggunakan media yang telah disediakan untuk mengkonfirmasi kode yang tepat atau bertanya mengenai kode klasifikasi yang menjadi kebutuhannya. Periode penyusunan laporan konsultasi klasifikasi statistik tahun 2023 ini dimulai dari bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan September 2023. Pengguna media konsultasi yang menanyakan kode klasifikasi statistik ke Ruang Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik (PSKS) selama periode tersebut adalah sebanyak 258 dokumen, baik melalui SILASTIK, telepon, kunjungan ke Ruang PSKS maupun melalui media lain seperti email, WhatsApp (WA) atau surat.

3. Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2023



Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (2), BPS mendapat amanat untuk membangun konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik dalam mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional. Salah satu klasifikasi yang dikembangkan oleh BPS adalah klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia Tahun 2020. Klasifikasi desa perdesaan dan perkotaan

ini perlu terus dievaluasi mengingat perkembangan daerah di Indonesia yang terus terjadi secara dinamis.

Dalam studi evaluasi ini, dilakukan studi terhadap konsep perkotaan dan perdesaan yang berlaku di lembaga internasional, di beberapa negara di Eropa, serta di Amerika Serikat. Studi dilakukan dengan mengkaji kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu daerah diklasifikasikan sebagai daerah perkotaan atau perdesaan. Setelah itu, dilakukan komparasi dengan kriteria yang digunakan dalam klasifikasi perkotaan dan perdesaan di Indonesia.

Dari hasil studi yang dilakukan, diketahui bahwa evaluasi lanjutan terhadap kriteria desa perkotaan dan perdesaan dapat dilakukan secara parial untuk setiap regional atau pulau agar evaluasi bersifat lebih efisien dan efektif. Evaluasi terhadap variabel yang digunakan pada kriteria desa perkotaan dan perdesaan masih terbuka dan dapat dilakukan perubahan, baik penambahan maupun penghapusan variabel berikut dengan perubahan skor dari setiap variabel. Selain itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut dan mendalam terhadap analisis statistik terkait syarat perkotaan sebagai kontrol atas perubahan desa perdesaan menjadi desa perkotaan.

4. Laporan Penyusunan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) Pertanian ST2023

Sensus Pertanian 2023 (ST2023) merupakan salah satu kegiatan sensus yang dilaksanakan BPS pada tahun 2023. Dalam perencanaan kegiatan ST2023, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah *bridging* atau merelasikan kode komoditas yang terdapat pada ST2023 ke Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk memenuhi kebutuhan data Sistem Statistik



Nasional (SSN). Sebelumnya, kode komoditas dalam ST2023 masih berkorespondensi ke KBLI 2009 dan KBKI 2010. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini dilakukan *bridging* kode komoditas ST2023 ke klasifikasi terbaru yang dirilis oleh BPS, yaitu KBKI 2015 dan KBLI 2020 berserta korespondensi antara keduanya.

Klasifikasi yang disusun mencakup komoditas, baik barang maupun jasa, yang merupakan hasil produk pertanian. Klasifikasi yang dikhususkan pertanian ini juga dimaksudkan untuk menyusun dan

mentabulasikan berbagai jenis data yang memerlukan uraian mengenai hasil produksi yang rinci dan lengkap yang digunakan untuk statistik pertanian, neraca nasional, dan jasa pertanian. Dengan demikian, BPS dapat menyediakan kerangka kerja yang lebih lengkap dan komprehensif untuk membuat perbandingan data antarwaktu yang berkaitan dengan klasifikasi barang dan jasa pada sektor pertanian.

Penyusunan *bridging* klasifikasi untuk kode komoditas ST2023 dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu pada saat gladi bersih dan pada saat pelaksanaan ST2023. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan komoditas yang perlu di-*bridging*. Secara umum, *bridging* kode yang dilakukan dibagi dalam tiga lembar kerja, yaitu master komoditas nonpenangkapan ikan dan jasa pertanian, master komoditas penangkapan ikan, serta master jasa pertanian.

Dari kegiatan *bridging* yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam identifikasi kode klasifikasi banyak disebabkan oleh pemahaman yang belum sempurna terhadap penyusunan klasifikasi. Akan tetapi, permasalahan ini dapat diatasi dengan adanya *sharing knowledge* mengenai klasifikasi yang tepat digunakan dalam setiap survey dan sensus.

5. Laporan Penyusunan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) Tahun 2023



Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) merupakan salah satu jenis klasifikasi baku yang disusun oleh BPS. Pada tahun 2023 dilakukan penyusunan rancangan revisi KBJI yang dilakukan berdasarkan usulan dan masukan yang diterima pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021. KBJI disusun untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi jabatan yang komprehensif, sebagai alat untuk mengorganisasi jenis jabatan yang didefinisikan sesuai dengan tugas yang dilakukan dalam pekerjaan.

Penyusunan KBJI meliputi jenis jabatan yang terdapat di Indonesia, baik sektor formal maupun informal, yang didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Penyusunan KBJI didasarkan pada *International Standard Classification of Occupations* (ISCO) revisi III pada tahun 2008 yang dirilis pada bulan Februari 2012 oleh International Labour Organization (ILO). Selain itu, penyusunan KBJI juga mempertimbangkan jenis jabatan yang dicakup pada KBJI 2002.

Langkah pengelompokan dan pemberian kode pada setiap jenis jabatan akan menghasilkan suatu kode klasifikasi jabatan yang homogen pada setiap struktur. Dengan demikian, struktur ketenagakerjaan di Indonesia akan mudah ditentukan. Pengkalsifikasian jabatan dalam KBJI 2023 didasarkan menurut tingkat keahlian dan spesialisasi pekerjaan menurut tingkat pengetahuan, peralatan yang digunakan, jenis bahan serta barang atau jasa yang diproduksi.

6. Laporan Pembinaan Standar Data Statistik



Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan bahwa kegiatan statistik diarahkan untuk mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang merupakan salah satu penerapan SSN dalam konteks Satu Data Indonesia (SDI). Dalam tata kelola Satu Data Indonesia, BPS berperan sebagai pembina data yang berkewajiban untuk menetapkan standar data statistik dan metadata statistik. Dalam hal ini, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei bertugas sebagai pembina data statistik untuk standar data statistik (SDS).

Sebagai pembina data statistik, BPS juga memiliki tugas untuk melakukan pembinaan kepada instansi-instansi lain dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada tahun 2023 BPS melakukan pembinaan terkait dengan konsep standar data statistik serta tata cara pengajuan standar data statistik melalui infrastruktur Indonesia Data Hub (INDAH).

Sepanjang tahun 2023, BPS telah melakukan 44 kegiatan pembinaan standar data statistik untuk 28 instansi di tingkat pusat. Dari kegiatan pembinaan-pembinaan tersebut didapatkan informasi bahwa terdapat beberapa kendala teknis dan nonteknis dalam pembinaan, seperti infrastruktur yang digunakan dalam penyusunan standar data statistik belum sesuai dengan kebutuhan, pengelolaan standar data statistik dalam INDAH serta manajemen user yang belum sesuai kebutuhan, penerbitan peraturan yang menetapkan standar data statistik terkendala di unit kerja pengampu regulasi, serta terbatasnya sumber

daya manusia berlatar belakang pendidikan statistik di unit kerja produsen data atau di walidata K/L.

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam aktivitas penyusunan standardisasi dan klasifikasi statistik :

1. Sumber Daya Manusia (SDM); Kurangnya SDM yang melaksanakan kegiatan Klasifikasi dan Standar Data Statistik (SDS)
2. Koordinasi dan Sosialisasi; Regulasi untuk menerbitkan output standar data statistik terkendala internal unit kerja lain. Serta kurangnya pemahaman baik internal BPS sendiri maupun di Kementerian/Lembaga dalam penerapan petunjuk teknis standar data statistik dan klasifikasi.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala dalam aktivitas penyusunan standardisasi dan klasifikasi statistik :

1. Menambah personil yang berasal dari anggota tim lain dan lulusan baru wilayah/daerah sebagai salah satu instrumen Satu Data Indonesia.
2. Dilakukan koordinasi pada level pimpinan tinggi/pimpinan madya, dan penentuan unit yang bertanggung jawab terhadap klasifikasi statistik dan SDS di BPS Daerah perlu ditentukan secara formal.

Indikator 4: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dibutuhkan master dan peta wilayah kerja statistik (*wilkerstat*) yang *up to date* dan berkualitas. Untuk memperoleh tujuan tersebut, setiap tahun Direktorat PMSS melakukan pemutakhiran master dan peta wilayah kerja statistik dengan memanfaatkan teknologi mulai dari proses *updating* *wilkerstat* sampai dengan pengiriman hasil peta yang dimutakhirkan. Capaian indikator dalam bentuk persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Turunan: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Turunan IKU	Penanggung Jawab	Capaian Indikator Turunan	Capaian IKU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master wilkerstat yang diupdate	Fungsi Pengembangan Kerangka Sampel	Persentase master wilkerstat yang diupdate terhadap pemutakhiran wilkerstat yang dilaporkan = 100 %	100 %
	Persentase peta wilkerstat yang diupdate	Fungsi Pengembangan Pemetaan Statistik	Persentase peta yang diupdate terhadap master wilkerstat yang diupdate = 100 %	

1. Pemutakhiran Master Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat)

Pemutakhiran master wilkerstat merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan kerangka wilayah kerja bagi kegiatan sensus/survei dari perencanaan, pelaksanaan sampai diseminasi kegiatan. Cakupan pemutakhiran master Wilkerstat tahun 2023 meliputi pemutakhiran master wilayah administrasi, master blok sensus dan master SLS.

a. Pemutakhiran Master File Desa (MFD) dan Master Blok Sensus (MBS)

Pemutakhiran master wilkerstat meliputi pemutakhiran pada wilayah administrasi (MFD), blok sensus (MBS), dan master SLS (MS) dilakukan oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Aplikasi *Frame Register System* (FRS) MFDOnline. Pemutakhiran ini dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun dan menghasilkan 2 (dua) kali master *up to date* dalam setiap tahunnya, yaitu master periode Januari-Juni (Semester 1) dan Juli-Desember (Semester 2). Menjelang akhir periode pemutakhiran, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan Berita Acara Perubahan Wilayah beserta dokumen-dokumen pendukungnya Admin Pusat melalui FRS MFDOnline.

Dari laporan perubahan wilayah yang disampaikan BPS Provinsi/ Kabupaten/ Kota, pada tahun 2023 terdapat perubahan wilayah pada tingkat provinsi, yaitu yang semula 34 provinsi berubah menjadi 38 provinsi. Hal ini tentu berdampak pada perubahan kode wilayah pada tingkat di bawahnya. Perubahan wilayah administrasi masih terjadi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Perubahan pada BS2020 difokuskan pada perubahan yang diakibatkan oleh perubahan pada tingkat desanya, seperti adanya penggabungan/pemekaran desa. Perubahan BS2020 terdiri dari pemutakhiran muatan BS,

serta pelaporan perubahan BS akibat perubahan wilayah administrasi di atasnya. Sedangkan pemutakhiran SLS di tahun 2023, dijabarkan sebagai berikut:

- Semester 1, pemutakhiran SLS diintegrasikan dengan kegiatan ST2023 pada bulan Mei 2023 dan diolah sampai dengan Agustus 2023.
- Semester 2, pemutakhiran SLS dilakukan melalui FRS-MFDOnline pada bulan November 2023 dan diolah sampai dengan Januari 2024.

Dalam rangka menjaga kualitas kegiatan pemutakhiran master wilkerstat, dilaksanakan supervisi atau pengawasan. Pengawasan dilakukan berjenjang, yaitu Tim BPS Pusat ke beberapa BPS Provinsi, BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota di bawahnya, serta BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan di bawahnya. Wilayah yang disupervisi memperhatikan kasus perubahan yang terjadi serta potensi kendala yang dihadapi pada wilayah tersebut.

Adapun capaian kegiatan pemutakhiran master wilkerstat pada 2023 ini adalah 100 persen. Hal ini ditunjukkan dengan laporan daerah yang diterima, dimana Kabupaten/Kota dan Provinsi mengirimkan Berita Acara pemutakhiran. Sinkronisasi antara FRS MFSONline dengan aplikasi lain yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran SLS, yaitu ST2023-Repo.

Berikut adalah Master Wilkerstat Tahun 2023 yang dimutakhirkan melalui FRS MFDOnline:

Tabel 3.5. Jumlah Master Wikerstat yang Dimutakhirkan pada Tahun 2023

Master Wilkerstat	Jumlah Master Wilkerstat	
	2023 Semester 1	2023 Semester 2
Provinsi	38	38
Kabupaten/Kota	514	514
Kecamatan	7.288	7.287
Desa/Kelurahan	83.968	83.975
Blok Sensus	854.133	854.119
SLS/Non SLS	1.342.600	1.342.673

b. Kajian Prosedur Pemutakhiran Satuan Lingkungan Setempat (SLS)

Untuk kebutuhan kegiatan sensus/survei ke depan Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan pengelolaan terhadap Satuan Lingkungan Setempat (SLS), yaitu suatu wilayah di bawah desa/kelurahan yang memiliki ketua dan pengurus yang telah operasional dan keberadaannya diakui oleh pemerintah. SLS ini di antaranya RT, RT, Dusun, Jorong, dan lain sebagainya, yang dapat berbeda-beda di berbagai wilayah. Pada tahun 2019, BPS telah melakukan kegiatan pemetaan dan pemutakhiran muatan SLS terkecil. Output kegiatan ini adalah master SLS beserta informasi muatannya yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan lapangan Sensus Penduduk 2020. Master SLS ini pertama kali dimanfaatkan untuk penyiapan basis data penduduk SP2020 yang data dasarnya bersumber dari registrasi penduduk Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Basis data dasar tersebut kemudian dilakukan verifikasi lapangan saat pelaksanaan sensus penduduk 2020 yang menghasilkan data penduduk kondisi ter-update menurut status de jure dan status domisili.

SLS diharapkan dapat digunakan sebagai *enumeration area* (EA) alternatif dari penggunaan blok sensus (BS) yang selama ini BPS gunakan. SLS memiliki kelebihan bahwa penggunaannya di masyarakat telah umum dikenal, meskipun perubahannya relatif lebih dinamis dan cepat. Untuk dapat digunakan sebagai EA dan master pada kerangka sampel, SLS tentunya harus selalu dimonitor perubahannya dari waktu ke waktu. Maka di tahun 2024 direncanakan kegiatan pemutakhiran EA SLS yang dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahap identifikasi perubahan SLS melalui kegiatan Podes, dan tahap pemutakhiran SLS sebagai tindak lanjut hasil identifikasi perubahan SLS oleh petugas pemutakhiran SLS. Hasil lapangan pemutakhiran SLS dalam bentuk informasi perubahan SLS dan peta pemutakhiran SLS, selanjutnya diolah di BPS Kabupaten/Kota untuk memperoleh master SLS beserta muatannya, dan peta SLS yang up to date dan bersesuaian.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, di tahap persiapan tahun 2023 disusun pedoman teknis lapangan pemutakhiran EA SLS dan pedoman pengolahan pemutakhiran EA SLS.

Masalah/kendala yang dihadapi dari kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kendala terkait pengelolaan dan pemutakhiran master wilkerstat
 - FRS MFDOnline diakses secara masif untuk melakukan pemutakhiran master SLS hasil ST2023, pada menjelang akhir kegiatan entri sistem menjadi sulit diakses;
 - Sinkronisasi antar sistem (FRS, GS, dan ST2023-Repo) masih belum sempurna sehingga masih perlu proses yang dilakukan di luar sistem.
2. Kendala terkait penyusunan prosedur pemutakhiran SLS

- Prosedur pemutakhiran EA SLS yang disusun belum dapat diujicoba-kan karena kegiatan uji coba dibatalkan.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala:

1. Terhadap kendala akses MFDOnline strategi yang dilakukan adalah:
 - Melaksanakan kegiatan *capacity building* metodologi secara berkala kepada penanggung jawab MFDOnline;
 - Menerapkan mitigasi pengiriman laporan perubahan wilayah melalui *email*. Admin pusat melakukan pemeriksaan laporan tersebut dan memperbaikinya pada MFDOnline;
 - Merancang perbaikan pada aplikasi FRS MFDOnline untuk dikerjakan pada periode selanjutnya;
 - Strategi sementara parallel dengan perbaikan pada sistem yang dilakukan adalah mengerjakan proses sinkronisasi data dilakukan di luar sistem, dan hasilnya diinput kembali ke dalam sistem yang terkait;
2. Strategi terkait penyusunan prosedur pemutakhiran SLS antara lain:
 - Melakukan diskusi dengan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota yang diintegrasikan dalam kegiatan Supervisi Pemutakhiran Master Wilkerstat, dalam rangka menggali potensi pemutakhiran master SLS di daerah serta menggali masukan dari daerah.

2. Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik

Kegiatan Penetapan Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat 2023 adalah kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 sebagai lanjutan dari kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023 pada tahun 2022. Output yang dihasilkan kegiatan ini adalah peta wilkerstat yang mutakhir beserta informasi muatan titik bangunan rumah tangga pertanian yang dihasilkan dari pelaksanaan lapangan ST2023, dan kerangka geospasial tutupan lahan pertanian yang mutakhir. Tahapan kegiatan ini sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Kerangka Geospasial ST2023.

Kegiatan ini berupa pemanggilan penanggungjawab peta tiap BPS provinsi.

Dalam kegiatan ini akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Rekonsiliasi peta wilkerstat antar provinsi.
- Penyampaian materi pengolahan peta wilkerstat, titik bangunan dan peta tutupan lahan.

2. Penyiapan Peta ST2023.

- Setiap BPS kabupaten/kota menyiapkan peta SLS untuk lapangan ST2023 mengikuti MFD 2022 semester 2. Selanjutnya BPS provinsi mengirimkan *link* penyimpanan peta SLS yang sudah dikompilasi dalam satu provinsi, melalui *email* peta@bps.go.id paling lambat 31 Maret 2023.
- Setiap BPS kabupaten/kota membuat *layout* peta WS menggunakan *template layout* yang disediakan pada *Geospatial System (GS)* kondisi Februari 2023.
- Hasil *layout* peta WS dicetak dengan kertas ukuran A3.

3. Pelatihan Petugas Pengolahan Peta dan Titik Bangunan Hasil ST2023.

- Pelatihan ini dilaksanakan di tiap provinsi.
- Pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari efektif, dan dapat ditambah 1 (satu) hari praktikum jika anggaran tersedia (praktikum dilakukan tanpa honor Innas).

4. Pengolahan Peta.

- Pengolahan peta dilaksanakan pasca lapangan ST2023 secara ban berjalan dengan pengolahan ST2023.
- Kegiatan pengolahan ini terdiri dari:
 - a. Pengolahan peta wilkerstat hasil lapangan ST2023.
 - b. Pengolahan titik bangunan hasil lapangan ST2023.
 - c. Pengolahan peta tutupan lahan.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

1. Terdapat keterlambatan pengiriman peta dari daerah sementara peta tersebut butuh segera disinkronisasi untuk kegiatan ST2023.
2. Terdapat permasalahan batas antar provinsi dan juga perbedaan batas wilayah peta BPS dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
3. Terdapat pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat.
4. Master titik bangunan, peta dan atribut peta tutupan lahan harus diupdate sesuai kondisi terbaru.
5. Terdapat kesulitan dalam melakukan *geotagging* titik bangunan di beberapa wilayah Papua dan wilayah sulit lainnya.
6. Pada kegiatan Pengolahan Peta dan Titik Bangunan Hasil ST2023, kendala yang ada sangat teknis terkait pengolahan.
7. Perlu penjaminan kualitas peta tutupan lahan.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

1. Mengirimkan surat perihal Progress Hasil Pengolahan Peta Wilkerstat 2022 ke BPS Provinsi.
2. Melakukan kegiatan *Fullboard* Rekonsiliasi Kerangka Geospasial ST2023 yang mengundang BPS Provinsi, BIG dan Kemendagri pada 14-17 Maret 2023.
3. Membuat diskusi Pemutakhiran Wilkerstat di Provinsi Papua dan Papua Barat Pasca Pemekaran Provinsi pada 14 Februari 2023.
4. Melakukan supervisi penyiapan peta ST2023 pada sampel sebanyak 12 provinsi.
5. Melakukan workshop intama dan koordinasi dengan Pusdiklat dalam rangka persiapan pelatihan Innas pengolahan peta dan titik bangunan hasil ST2023.
6. Melakukan Supervisi Pelatihan Petugas Pengolahan Peta ST2023, Supervisi Pengolahan Peta dan Titik Bangunan ST2023 dan Supervisi Pengolahan Peta dan Titik Bangunan ST2023.
7. Mengirimkan surat ke daerah terkait progress kegiatan Pengolahan Peta dan Titik Bangunan Hasil ST2023.
8. Membuat instrumen tambahan pada Pengolahan Peta dan Titik Bangunan Hasil ST2023 untuk dikirim ke daerah.

Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data

Indikator 5: Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani

Indikator ini menggambarkan pembinaan dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa konsultasi dan pemberian rekomendasi metodologi (*technical assistance*). Pada Tahun 2023, seluruh permintaan pembinaan berhasil dilayani oleh Direktorat PMSS. Secara umum, jenis pembinaan kegiatan statistik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

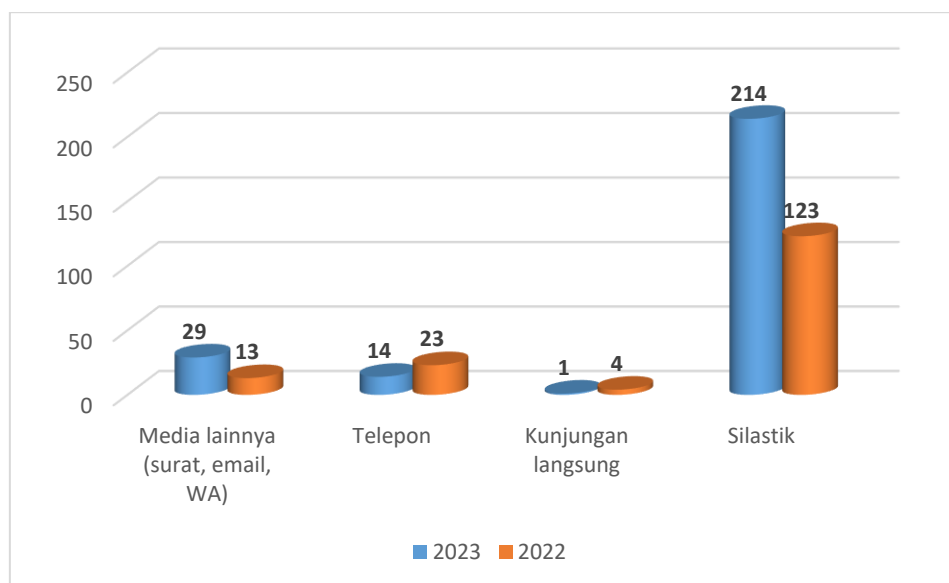
Tabel 3.6. Jenis Pembinaan pada Direktorat PMSS

No	Jenis Pembinaan	Jumlah
1	Pembinaan dan konsultasi standardisasi dan klasifikasi statistik	347
2	Pembinaan dan konsultasi metodologi survei sektoral	63
	Jumlah	410

1. Pembinaan Standar Data dan Klasifikasi Statistik 2023

Permintaan pembinaan kegiatan statistik terkait klasifikasi statistik mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui melalui jumlah permintaan konsultasi klasifikasi Kementerian/lembaga/institusi/perorangan dan jumlah undangan narasumber dari Kementerian/Lembaga yang tidak semua dokumennya dikumpulkan. Karena jumlahnya sudah melebihi target yang ditentukan di awal tahun, maka realisasinya melebihi dari 100 persen.

Pembinaan Standar Data dan Klasifikasi Statistik juga dilakukan dengan Konsultasi Klasifikasi Statistik. Konsultasi ini disediakan untuk berbagai kalangan pengguna klasifikasi statistik baik pegawai internal BPS untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sensus/survei BPS, maupun pihak eksternal yaitu institusi pemerintah, perusahaan, dan perorangan. Laporan konsultasi klasifikasi statistik disusun dalam rangka pendokumentasian kegiatan konsultasi dan penyesuaian dengan perubahan perekonomian, khususnya kode klasifikasi yang sering berhubungan dengan kebutuhan pengguna, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai klasifikasi statistik yang belum secara eksplisit terjawab dari deskripsi publikasi klasifikasi statistik baik KBLI, KBJI, KBKI maupun Klasifikasi lainnya seperti Klasifikasi Urban Rural dan juga mengenai Standar Data Statistik (SDS). Hal ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan/revisi klasifikasi seklaigus SDS walaupun masih sedikit penanya SDS-nya. Di samping itu, laporan menjadi acuan bagi tim konsultasi ke depan dalam memberikan rekomendasi kode klasifikasi statistik yang tepat sehingga meningkatkan kualitas data yang berhubungan dengan penggunaan klasifikasi. Jumlah konsultasi pada periode penyusunan laporan tahun 2023 (Oktober 2022 s.d. September 2023) mencapai 100 persen konsultasi klasifikasi statistik dengan total 258 pengguna konsultasi, baik melalui SILASTIK (214 pengguna), kunjungan langsung (1 pengguna), telepon (14 pengguna), dan lainnya, yaitu email, WA, maupun surat ke Direktorat PMSS (29 pengguna).



Gambar 3.1. Jumlah Pengguna Menurut Media yang Digunakan

Sedangkan untuk kegiatan pembinaan/pelatihan standardisasi dan klasifikasi statistik kepada Kementerian/Lembaga terkait klasifikasi statistik sebagai narasumber yang melibatkan peserta dalam grup/sekelompok orang/unit kerja instansi berdasarkan permintaan/ undangan pada tahun 2022 terhitung minimal 89 kegiatan, yang direkap kegiatan pembinaan terkait Standar Data Statistik sebesar 34 kali dan pembinaan terkait Klasifikasi Statistik sebesar 55 kali.

Pada tahun 2023, Direktorat PMSS melakukan pembinaan standar data dan klasifikasi statistik, di antaranya di triwulan pertama:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan pembinaan
1	3-Jan-23	Rapat Pembahasan KBLI Industri Drone
2	9-Jan-23	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia, Minggu ke-2 Januari 2023
3	13-Jan-23	In-depth Discussion mengenai Rencana Aksi Sektor Jasa Telekomunikasi di Bidang Data Center dalam Rangka Studi Grand Design Akselerasi Ekspor Indonesia
4	16-Jan-23	Rakor Tindak Lanjut PDN
5	26-Jan-23	Workshop Standar Data dan Metadata Parekraf
6	2-Feb-23	Rapat pembahasan KBLI industri drone
7	6-Feb-23	Rakor Tindak Lanjut PDN
8	8-10 Februari 2023	Rapat Persiapan Penyusunan Standar Data Sektor Transportasi
9	8 Februari 2023	Rapat Teknis Rencana Investasi Anoda Grafrit sebagai Komponen Baterai Listrik

10	22-24 Feb 2023	FGD Cakupan Ekonomi Syariah
11	24-Feb-23	Rapat Pembahasan Standar Data, Metadata Statistik dan Kualitas Data Pangan
12	28 Maret 2023	Rakor Tindak Lanjut PDN
13	2 Maret 2023	Rapat Diskusi Teknis Pengembangan Indikator Aktivitas Usaha Syariah
14	6 Maret 2023	Rapat eksternal dengan Kementerian/Lembaga BPOM Pembahasan KBLI Pangan Olahan
15	9-Mar-23	Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Metadata dan Standar Data di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
16	9-Mar-23	Rapat Pembahasan Profiling Modeling Data
17	13-Mar-23	Rapat Pembahasan Indikator Aktivitas Usaha Syariah Kluster Parekraf
18	13 Maret 2023	Rapat eksternal dengan Kementerian/Lembaga KNEKS, BI, dan Kemenparekraf terkait Parekraf Syariah
19	14-Mar-23	Finalisasi Data Transportasi Darat Tahun 2022 dan Pembahasan Data Prioritas Tahun 2023
20	20-21 Maret 2023	Rapat Penyelenggaraan Satu Data Lingkup Badan P2SDM Tahun 2023
21	30 - 31 Maret 2023	FGD Diskusi Lanjutan Indikator Aktivitas Usaha Syariah sebagai Proksi PDB Syariah

Jadi total pembinaan dan konsultasi standardisasi dan klasifikasi statistik sebesar 347 kegiatan dengan 258 konsultasi dan 89 pembinaan baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta yang memberikan masukan.

2. Pembinaan dan Konsultasi Metodologi Survei Sektor

Pada tahun 2023, Direktorat PMSS melakukan pembinaan penyusunan metodologi survei sektoral, di antaranya:

1. Survei Stok Beras Akhir Tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
2. Pada kegiatan Pendataan Pemutakhiran PK-22 yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) .
3. Pada kegiatan penghitungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara menggunakan MPD yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
4. Pada kegiatan diseminasi hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Dalam Negeri.

5. Pada kegiatan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
6. Pada kegiatan pembahasan statistik dan perangkat manajemen data yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
7. Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
8. Penyusunan Indeks Kriminal Nasional yang dilakukan oleh Bareskrim Polri.
9. *Focus Group Discussion* (FGD) Proses Bisnis P3DN Eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
10. Bimbingan Teknis Sampling Obat yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
11. Survei Tracer Study SMK Tahun 2023 yang dilakukan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Survei Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat (SKKM) terhadap obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM.
13. Training on CsPro Application of IDHS 2023 yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
14. Asistensi dan Transfer Knowledge Perhitungan Penimbang dan Sampling Error Pemutakhiran PK-23 yang dilakukan oleh BKKBN.
15. Workshop Teknik Uji Petik dalam Pemeriksaan Kepatuhan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
16. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2023 yang dilakukan oleh KemenPPPA.
17. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
18. Penyusunan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
19. *Focus Group Discussion* ((FGD) Konsepsi Metode Perhitungan Biaya Sosial Akibat Kecelakaan LLAJ yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
20. *Focus Group Discussion* ((FGD) Reviu Konsep dan Cakupan Wisatawan Nusantara yang dilakukan oleh Kemenparekraf.
21. *Focus Group Discussion* ((FGD) Evaluasi Pembobotan dan Indikator IFPI 2018-2022 yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

22. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilakukan oleh BKPK Kementerian Kesehatan.
23. Survei Stok Beras Akhir Tahun (SSBAT) 2023 yang dilakukan oleh Bapanas.
24. Survei Stok Jagung Akhir Tahun (SSJAT) 2023 yang dilakukan oleh Bapanas.
25. *Focus Group Discussion* ((FGD) Penjaringan Isu Strategis Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
26. Pembahasan Kajian Target Sampel Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM.
27. *Focus Group Discussion* (FGD) Metodologi Wisatawan Mancanegara pada 5 Destinasi Super Prioritas yang dilakukan oleh Kemenparekraf.
28. *Fullboard* Analisis Geospasial antara Unit Kerja dengan Universitas dan Verifikasi Dokumen Pencantuman Gelar melalui SIASN yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Sebagian besar pembinaan yang dilakukan terhadap K/L bertujuan untuk menyusun kerangka sampel sesuai kaidah survei, dapat melakukan pemilihan sampel yang menggunakan *probability sampling* sehingga kualitas statistik sektoral yang dihasilkan menjadi baik, dan berkaitan dengan penyusunan penimbang hasil survei, serta metodologi pendataan dalam pelaksanaan survei. Tantangan yang dihadapi adalah dibutuhkan penyusunan petunjuk teknis yang baku dalam hal penyusunan kerangka sampel dan pemilihan sampel sesuai dengan standar penyelenggaraan kegiatan statistik yang baik.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

- Kebanyakan K/L belum paham tentang dasar statistik
- Materi untuk diberikan pembinaan yang kadang kurang sesuai dengan lingkup kerja Direktorat PMSS
- Undangan yang tidak melalui email direktorat sehingga tindak lanjut terkesan lambat.

Strategi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/kendala:

- Perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai konsultasi yang diminta
- Perlu komunikasi yang intensif sehingga bisa menyampaikan paparan yang bersesuaian pada Subject Matter.

Menginfokan ke K/L/D/I yang mengundang agar melalui email direktorat..

Indikator 6: Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani

Indikator ini menggambarkan permintaan kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, pemetaan serta *statistical business register* (SBR). Kerja sama yang dilakukan dapat berupa penyusunan metodologi sampling survei, cakupan klasifikasi, dan standar data statistik yang akan digunakan. Jumlah kerja sama berdasarkan jenis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Jenis Kerja Sama pada Direktorat PMSS

No	Jenis Kerja Sama	Jumlah
1	Kerja sama penyusunan metodologi survei sektoral	8
2	Kerja sama standar data statistik	1
3	Kerja sama register usaha	1
	Jumlah	10

Kerja Sama Penyusunan Metodologi Survei Sektoral

Secara umum, kerja sama yang dilakukan mencakup penyusunan desain sampling dan kerangka sampel, penyediaan daftar sampel blok sensus, penyediaan peta wilayah blok sensus, penyediaan daftar listing rumah tangga pada blok sensus terpilih, penghitungan penimbang sampling, dan konsultasi terkait metode sampling.

Selama tahun 2023, Direktorat PMSS melakukan 8 (delapan) kerjasama penyusunan metodologi sampling survei sektoral sebagai berikut:

1. Survei Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan (SKKM) Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ruang lingkup kerja sama meliputi penyusunan desain *sampling*; penyediaan daftar sampel dan peta; penyiapan dan penghitungan penimbang.
2. Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyusunan desain *sampling* dan kerangka sampel; pemilihan sampel blok sensus di setiap tingkat wilayah administratif; penyediaan daftar sampel blok sensus; penyediaan *file image* peta blok sensus; penyediaan daftar

- pemutakhiran rumah tangga; penyiapan dan penghitungan penimbang; dan alih pengetahuan dan pendampingan kegiatan.
3. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyusunan desain *sampling* dan kerangka sampel; pemilihan sampel blok sensus di setiap tingkat wilayah administratif; penyediaan daftar sampel blok sensus dan *file image* peta blok sensus; penyediaan daftar pemutakhiran rumah tangga pada blok sensus terpilih; penyiapan dan penyediaan blok sensus pengganti termasuk daftar pemutakhiran rumah tangga dan *file image* peta blok sensus bila diperlukan; penyiapan dan penghitungan penimbang; penyusunan rekomendasi statistik, standar data, standar metadata dan referensi data; penyusunan perhitungan proyeksi terhadap variabel yang belum memenuhi jumlah sampel minimal bila diperlukan; dan alih pengetahuan dan pendampingan kegiatan Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023.
 4. Survei Stok Beras Akhir Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional. Ruang lingkup kerja sama meliputi identifikasi kebutuhan kegiatan survei; penyiapan rancangan dan penyusunan kelengkapan kegiatan survei; pelaksanaan survei; pengolahan data; dan pelaksanaan monitoring, analisis hasil, evaluasi, dan diseminasi.
 5. Survei Stok Jagung Akhir Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional. Ruang lingkup kerja sama meliputi identifikasi kebutuhan kegiatan survei; penyiapan rancangan dan penyusunan kelengkapan kegiatan survei; pelaksanaan survei; pengolahan data; dan pelaksanaan monitoring, analisis hasil, evaluasi, dan diseminasi.
 6. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Ruang lingkup kerja sama meliputi pemutakhiran rumah tangga pada blok sensus yang terpilih; pendataan SNLIK Tahun 2024 dan supervisi pendataan; dan pengolahan hasil SNLIK Tahun 2024.
 7. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ruang lingkup kerja sama kegiatan survei tersebut meliputi pendampingan dalam merancang instrumen yang terdiri dari penyusunan kuesioner dan buku pedoman; penyusunan metodologi yang terdiri dari pembahasan desain *sampling* dan kerangka sampel; penyediaan daftar sampel blok sensus dan *file image* peta blok; pembangunan aplikasi *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI)

Android untuk pemutakhiran serta penarikan sampel dan pendataan sampel; pendampingan uji coba kegiatan SPHPN 2024; dan alih pengetahuan dalam proses perencanaan kegiatan SPHPN 2024.

8. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ruang lingkup kerja sama kegiatan survei tersebut meliputi pendampingan dalam merancang instrumen yang terdiri dari penyusunan kuesioner dan buku pedoman; penyusunan metodologi yang terdiri dari pembahasan desain *sampling* dan kerangka sampel; penyediaan daftar sampel blok sensus dan *file image* peta blok; pembangunan aplikasi *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) Android untuk pemutakhiran serta penarikan sampel dan pendataan sampel; pendampingan uji coba kegiatan SNPHAR 2024; dan alih pengetahuan dalam proses perencanaan kegiatan SNPHAR 2024.

Kerja Sama Standar Data Statistik

Kerja sama standar data statistik (SDS) yang dilakukan selama tahun 2023 adalah standar data kemaritiman. Standar Data Kemaritiman Indonesia menggunakan standar data yang merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik No.4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik yang berisi penyusunan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Data yang dikumpulkan dari K/L pengampu data pembangun PDB kemaritiman berupa data dasar untuk menghitung indikator produksi, indikator harga, indikator output, dan indikator rasio maritim harus distandarkan agar mudah dipakai dan diintegrasikan.

Salah satu kegiatan statistik dalam optimalisasi potensi sumber daya kelautan Indonesia yaitu pengukuran output sektor maritim untuk mengetahui kontribusi sektor maritim, sehingga dapat disusun Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim. Sebelum penyusunan PDB Maritim, diperlukan klasifikasi kategori klaster yang masuk ke dalam sektor maritim. Pada tahun 2021 dan 2022, BPS dan Kemenko Marves kembali bekerja sama untuk menyusun KBLI Kemaritiman 2021 sebagai dasar penghitungan PDB Maritim 2022.

Cakupan aktivitas maritim dalam KBLI Kemaritiman 2022 sesuai dengan referensi internasional yang telah disepakati antara Kemenko Marves dan BPS, yakni Ocean Accounting for Sustainable Development (version 0.9.1 October 2020) Consultation Draft. Ocean accounts adalah kompilasi informasi yang terstruktur — konsisten dan dapat dibandingkan: peta, data, statistik, dan indikator — tentang lingkungan laut dan pesisir, termasuk keadaan sosial terkait dan aktivitas ekonomi.

Guna memenuhi salah satu prinsip Satu Data Indonesia, yaitu pemenuhan standar data statistik, maka perlu disusun standar data statistik kemaritiman. Proses penyusunan standar data statistik kemaritiman tersebut mengikuti alur penyusunan standar data sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik, walaupun kegiatan ini dilakukan di bawah payung Perjanjian Kerja Sama.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan kegiatan penyusunan standar data statistik melalui kegiatan:

1. Workshop 25-28 Juli 2023

Penyelenggara : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Bentuk Kegiatan: Workshop

Tempat : Hotel Amaroossa Grande Bekasi;
Jl. Ahmad Yani No.88, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141

Agenda Kegiatan : Workshop Penyusunan Standar Data dan Metadata Produk Domestik Bruto (PDB) Kemaritiman

Tema/Judul Materi : Penyusunan Standar Data Statistik Data Input PDB Maritim

Peserta : a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
b. Badan Pusat Statistik
c. Kementerian Kelautan dan Perikanan
d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Workshop 22-24 November 2023

Penyelenggara : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Bentuk Kegiatan : Workshop

Tempat : ASTON Bogor Hotel & Resort, Jl. Pahlawan, RT.05/RW.12, Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat

Agenda Kegiatan : Workshop Pembaruan Ruang Lingkup, Pemantauan Pengembangan Dashboard serta Standar Data dan Metadata Maritim

Tema/Judul Materi : Standar Data Statistik dalam PDB Maritim

Peserta : a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
b. Badan Pusat Statistik
c. Institut Pertanian Bogor
d. Prospera

Kerja Sama Register Usaha

Berbekal MoU antara BPS dan Kementerian Perindustrian Nomor: 283.1/M-IND/5/2018 dan 07/KS.M/07-V/2018 tanggal 7 Mei 2018, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei telah bersurat kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian dengan Nomor: B-1054/03100/VS.020/11/2022 tanggal 30 November 2022 perihal permohonan data direktori perusahaan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan telah diterima feedback berupa data yang dibutuhkan melalui surat no: 9/SJ-IND.7/IND/I/2023 13 Januari 2023 dan datanya telah digunakan untuk meng-update SBR dengan melakukan *matching data* SIINAS dengan direktori SBR.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2023 sampai dengan 2020

Selama jangka waktu 2020-2023 terdapat perubahan jumlah indikator. Pada 2020 terdapat 5 indikator, 2021 terdapat 7 indikator dan 2022-2023 terdapat 6 indikator. Indikator yang ditampilkan pada tabel di bawah adalah indikator yang bersesuaian saja.

Selanjutnya juga terdapat perubahan satuan indikator kinerja. Satuan indikator kinerja yang berubah adalah jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran. Sebelumnya satuan indikator ini berupa jumlah dokumen dan tahun 2021 berubah menjadi persentase. Begitu juga pada satuan indikator permintaan dan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani, sebelumnya berupa jumlah permintaan/kerja sama dan pada 2021 berubah menjadi persentase. Satuan berupa persentase dinilai lebih baik untuk menilai suatu capaian kinerja.

Dari hasil penghitungan capaian kinerja dalam rentang waktu 2020-2023 sama-sama menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kinerja yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2023 sampai dengan 2020 terlampir pada Lampiran 1.

3.1.3. Realisasi Kinerja per IKU dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun Pertama Periode Renstra (2020)

Secara umum, jika capaian 2023 dibandingkan dengan target Renstra 2020, semuanya sudah mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 125,12 persen. Target Renstra 2020 memang lebih rendah dari target 2023 sehingga hasil penghitungannya bisa lebih dari 100 persen. Tabel realisasi kinerja per IKU dari tahun 2023 sampai dengan tahun pertama periode Renstra (2020) terlampir pada Lampiran 2.

3.1.4. Realisasi Kinerja per IKU Tahun 2023 terhadap Target Renstra Tahun 2023

Secara umum, jika capaian 2023 dibandingkan dengan target Renstra 2023, semuanya sudah mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 100 persen. Tabel realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target Renstra tahun 2023 terlampir pada Lampiran 3.

3.1.5. Realisasi Kinerja per IKU Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra 2024

Secara umum, jika capaian 2023 dibandingkan dengan target Renstra 2024, semuanya sudah mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 100 persen. Tabel realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target akhir renstra 2024 terlampir pada Lampiran 4.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pada 2023 terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Direktorat PMSS diantaranya:

1. Analisis Geospasial

Kegiatan terkait analisis geospasial yang dilakukan yaitu:

- Bekerjasama dengan UN Habitat melaksanakan “*Workshop on SDG 11 indicators computations and application of the Degree of Urbanisation (DEGURBA) for production of comparable urban data in Indonesia*” yang diselenggarakan di Bandung, tanggal 19–23 Juni 2023. Acara ini yang juga dihadiri oleh BIG, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam *workshop* ini dipelajari cara menghitung indikator 11 *SDGs* baik spasial maupun non spasial.
- Analisis geospasial hasil *Long Form SP2020*
Data statistik *official* merupakan fondasi dari perhitungan *SDGs*, namun pada kenyataannya untuk menghasilkan indikator *SDGs* tidak bisa semata-mata menggunakan data statistik. Dalam *the 2030 Agenda for Sustainable Development*, informasi geospasial dan *remote sensing* memiliki erat kaitannya dengan perhitungan beberapa indikator *SDGs*. Contoh indikator *SDGs* yang

sangat tergantung dengan informasi geospasial adalah indikator 11.3.1 *ratio of land consumption rate to population growth rate*, atau rasio laju pertumbuhan lahan terhadap laju pertumbuhan populasi.

Pada kegiatan *Meeting for Development and Evaluation 2020 Population Census Geospatial*, tema indikator SDGs 11.3.1 diangkat sebagai tema utama yang akan disandingkan dengan beberapa indikator yang dihasilkan *Long Form SP2020*. Lokus kajian di 10 wilayah metropolitan yang merupakan rencana strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) 2020–2024. Pada akhirnya, output kegiatan ini akan menghasilkan hasil analisis geospasial untuk melihat laju pertumbuhan perkotaan di 10 kawasan metropolitan berdasarkan indikator SDGs 11.3.1 dan hasil *Long Form SP2020*.

- Pengolahan data geospasial Statistik Teknologi Informasi
Dalam rangka penyusunan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks Pembangunan TIK)/*ICT Development Index* tahun 2022 dengan metode baru dari International Telecommunication Union (ITU) versi 3, dibutuhkan dua indikator yaitu persentase populasi yang tercakup oleh minimal jaringan mobile 3G dan persentase populasi yang tercakup oleh minimal jaringan LTE/WiMAX.

2. Pemeliharaan Sistem Informasi Geografis Terkait

- Pengembangan *Geospatial System*
- Pembangunan *Web GIS* dan *Story Map* Hasil Analisis Geospasial

3. Pengembangan Aplikasi Geospasial Lainnya

- Pembangunan aplikasi wilkerstat untuk Survei Lembaga Keuangan (SLK)
- Pembangunan aplikasi wilkerstat untuk Survei Konstruksi 2023
- Pembangunan aplikasi wilkerstat untuk Survei Industri Mikro dan Kecil 2023

4. Satu Data Indonesia: Kode Referensi dan Data Induk

- *Bridging* Kode relasi yang dilakukan setiap semester

5. Pembuatan Peta Tematik dan Penyediaan Data

- Pembuatan Peta Tematik
 - Peta Tematik Sensus Pertanian 2023
 - Peta Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2023
 - Peta Indeks Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
- Penyediaan peta untuk keperluan berbagai survei dari Kementerian/Lembaga:

- Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk Survei Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Tahun 2023 kerjasama dengan BPOM.
- Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk Survei Prevalensi Pengguna Narkoba kerjasama dengan BNN.
- Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk Survei Kesehatan Indonesia 2023 kerjasama dengan Kemenkes.
- Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk keperluan PKL Politeknik STIS.
- Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk keperluan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah 2023 dan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah 2023 kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

6. Kerangka Sampel Area (KSA)

- Penggantian sampel KSA
- Sinkronisasi pengajuan sampel yang disetujui

KSA didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG), pengideraan jauh, teknologi informasi, dan statistika yang saat ini sedang diimplementasikan di Indonesia untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan. Pendekatan KSA diharapkan mampu menjawab penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional. Kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan modul penggantian sampel KSA pada sistem KSAPro.

7. Pembuatan Peraturan/Regulasi terkait Wilkerstat

- Perubahan kode dan nama wilkerstat
Regulasi tentang Kode dan Nama Wilkerstat dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 Tahun 2023. Dalam Keputusan tersebut, jumlah kabupaten kota, kecamatan dan desa kondisi 2023 semester 1 adalah sejumlah 416 kabupaten, 98 kota, 7.288 kecamatan dan 83.971 desa.
- Pembuatan Perka Buku Pedoman Pelatihan Pengolahan Peta dan Titik bangunan Hasil ST2023

3.2. Prestasi dan Inovasi Direktorat PMSS Tahun 2023

Prestasi dan inovasi yang telah dicapai Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei pada tahun 2023 di antaranya:

- 1 Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Novia Permatasari) yang mengikuti *Workshop on "Application of the Degree of Urbanisation (DEGURBA) for Production of Comparable Urban Data In Select Countries"* diselenggarakan di *Nairobi, Kenya, 14-16 November 2023*.
- 2 Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Wida Widiastuti) yang berpartisipasi dalam *4th International Seminar on Big Data for Official Statistics Remote Sensing for Agriculture Statistics* pada 15-17 November 2023 di Hangzhou, China.
- 3 Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Novia Permatasari) yang mempublikasikan artikel ilmiah berjudul *Small area estimation of household expenditure on insurance programs for minimizing the impact of natural disasters in West Java, Indonesia* pada *Statistical Journal of the IAOS, vol. 39, no. 3, pp. 729-743, 2023*.
- 4 Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Muhammad Yunus Hendrawan) yang berpartisipasi dalam mempublikasikan artikel ilmiah berjudul *Google trends and online media data for supply and demand information in waste management evaluation in Jakarta* pada *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science (Jurnal Terindeks Sinta 1, Scopus Q3), vol. 30, no. 2, pp. 1140-1149, 2023*.
- 5 Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Muhammad Yunus Hendrawan) yang berpartisipasi dalam mempublikasikan artikel ilmiah berjudul *Strategic insights for MSMEs: navigating the new normal with big data and business analytics* pada *Journal of Asia Business Studies (Jurnal Terindeks Scopus Q1), 2023*.
- 6 Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Wida Widiastuti) yang masuk ke dalam *Geospatial Team* di *United Nations (UN)*.
- 7 Terlibat sebagai penyelenggara *UN Workshop on Big Data* dengan tema "*Introduction to Remote Sensing and Land Cover Classification using Remote Sensing*".
- 8 Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Annisarahmi Nur Aini Aldania) yang mengikuti *Workshop on "28th Meeting of the Wiesbaden Group on Business Registers"* diselenggarakan di Den Haag, Belanda, 2-6 Oktober 2023.
- 9 Partisipasi tim SBR sebagai peserta dalam *Webinar series on the Global Initiative on Unique Identifiers for Business* yang diselenggarakan oleh *United Nation Statistics Devision (UNSD)*. *Webinar series* terdiri dari 3 series yang dilaksanakan di bulan Oktober dan November 2023 dan Januari 2024.

- 10 Partisipasi aktif tim SBR dalam pertemuan *Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESERIC) Conference* dalam memberikan paparan terkait SBR di Indonesia.
- 11 Partisipasi tim SBR sebagai peserta kursus pada kegiatan *Machine Learning for Official Statistics and the SDGs-2023* yang diselenggarakan oleh *United Nation Statistical Institute for Asia Pacific (UN SIAP)*.
- 12 Tim SBR (Ayu Setyawati) ikut serta dalam kegiatan *Technical Assistance* di Melbourne yang diselenggarakan oleh *Australian Bureau of Statistics (ABS)* bulan Mei 2023.
- 13 Tim SBR sebagai peserta *Online Training* pada kegiatan *Linking Trade with Business Statistics* yang diselenggarakan oleh ASEANstats berkoordinasi dengan *Department of Statistics Malaysia (DOSM)* pada Mei 2023.
- 14 Keikutsertaan tim SBR berdiskusi dengan tim *Program Management ABS* pada November 2023 yang beragendakan penyampaian kondisi terkini SBR dan dukungan dari ABS.
- 15 Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Arif Handoyo Marsuhandi) yang turut berpartisipasi dalam kursus "*Data 4 Development CSIRO*" yang diselenggarakan di Canberra, Australia pada tanggal 12 Oktober – 20 Desember 2023.
- 16 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang turut berpartisipasi dalam eLearning Course *Machine Learning for Official Statistics and SDG Indicators*, pada tanggal 27 November 2023 – 19 January 2024.
- 17 Terlibat sebagai penyelenggara *UN Habitat Workshop on SDG 11 indicators computations and application of the Degree of Urbanisation (DEGURBA) for production of comparable urban data in Indonesia*" yang diselenggarakan di Bandung, tanggal 19–23 Juni 2023.
- 18 Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Novia Permatasari) yang turut berpartisipasi dalam Kompetisi Data *Conquest* Kementerian Keuangan 2023 dan meraih Juara I dengan kajian ilmiah berjudul "*Geotax Insight: Menjejak Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Citra Satelit*".
- 19 Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Wida Widiastuti) yang terpilih menjadi Finalis Nasional Insan Statistik Teladan 2023.
- 20 Membuat kegiatan *Sharing Knowledge Pre-Processing Data Remote Sensing* untuk Fase Tumbuh Padi dengan narasumber dari BRIN.

3.3. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023

3.3.1. Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Sasaran

Pagu anggaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei menjalankan fungsi pemerintahan dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik selama tahun 2023 adalah sebesar 2,6 milyar rupiah. Realisasi anggaran menurut program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program Direktorat PMSS Tahun 2023

No.	Program	Pagu 2023 (Rp)	Realisasi s/d Desember 2023 (Rp)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik				
2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei				
005	Dokumen, laporan, dan publikasi pengembangan metodologi sensus dan survei	391.023.000	386.646.953	98,88
2910. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				
006	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	2.209.714.000	2.111.235.106	95,54
	Jumlah	2.600.737.000	2.497.882.059	96,05

Secara umum, penyerapan anggaran pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sudah dilakukan dengan sangat maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran sebesar 96,05 persen. Penyerapan anggaran pada kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Kode 2900) sebesar 98,88 persen dan kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Kode 2910) sebesar 95,54 persen.

3.3.2. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Menurut Program dan Sasaran Direktorat PMSS Tahun 2023

No.	Program/Sasaran	Pagu 2023 (Rp)	Realisasi s/d Desember 2023 (Rp)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik				
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas				
1	Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	1.086.158.000	1.022.494.880	94,14
2	Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	186.445.000	185.496.779	99,49
3	Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	120.760.000	120.012.954	99,38
4	Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	1.207.374.000	1.169.877.446	96,89
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data				
5	Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	0	0	0
6	Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	0	0	0
	Jumlah	2.600.737.000	2.497.882.059	96,05

Penjelasan per indikator sebagai berikut:

Indikator pertama: Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran satu pada tujuan pertama sebesar Rp. 1.086.158.000,-. Dari anggaran yang disediakan selama tahun 2023 dapat diserap sebesar Rp. 1.022.494.880,- atau sebesar 94.14 persen. Anggaran ini berasal dari kegiatan

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dan kegiatan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Anggaran yang berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, direncanakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan supervisi evaluasi pengembangan desain sensus dan survei ke BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyerapan ini sebagian besar digunakan untuk melakukan supervisi ke BPS Provinsi/Kabupaten/Kota terkait penerapan metodologi sampling dalam pelaksanaan survei BPS, namun pelaksanaannya belum optimal.

Sementara anggaran yang berasal dari kegiatan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan digunakan untuk mendukung kegiatan *Post Enumerations Survey* (PES) Sensus Pertanian Tahun 2023. Kegiatan PES ST2023 dilaksanakan di 34 provinsi meliputi 5.892 SLS yang tersebar di 230 sampel kabupaten/kota. Penyerapan ini sebagian besar digunakan untuk melakukan supervisi pengendalian dan evaluasi kegiatan lapangan PES ST2023 ke BPS Kabupaten/Kota baik pada pengumpulan data lapangan dan rekonsiliasi lapangan, serta pengiriman koordinator *matching* pada kegiatan *matching* di BPS Provinsi.

Indikator kedua: Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran kedua pada tujuan pertama untuk menyediakan kerangka sampel usaha dan rumah tangga yang akurat sebesar Rp 186.445.000,-. Anggaran ini berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Anggaran ini direncanakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan *Groundcheck* SBR, *fullboard* evaluasi *enumeration area* (EA) SLS, *fullboard* evaluasi register usaha, honor narasumber dan supervisi. Supervisi ke BPS Provinsi/Kabupaten/Kota mencakup kegiatan pengecekan lapangan data SBR, evaluasi EA SLS, dan pengawasan kualitas pemutakhiran MFD dan MBS.

Dari anggaran yang disediakan selama tahun 2023 dapat diserap Rp 185.496.779,- atau sebesar 99.49 persen. Penyerapan ini sebagian besar digunakan untuk melakukan supervisi ke BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pengecekan lapangan *Groundcheck* SBR-QIS dan pengawasan kualitas pemutakhiran MFD dan MBS. Honor narasumber dimanfaatkan untuk kegiatan *fullboard* evaluasi register usaha dan kegiatan *profiling* SBR. Agar penyerapan dapat optimal paket internet *briefing* provinsi *Groundcheck* SBR-QIS dan sebagian honor narasumber yang tidak digunakan dilakukan revisi untuk kegiatan konfirmasi hasil *Groundcheck* SBR-QIS dan identifikasi pengembangan SBR. Sedangkan

fullboard evaluasi EA SLS dan supervisi EA SLS dilakukan revisi untuk kegiatan fullboard evaluasi register usaha dan supervisi pengawasan kualitas pemutakhiran MFD dan MBS karena anggaran kegiatan EA SLS di daerah ditiadakan. Pagu yang masih ada merupakan sisa penyerapan dari transport lokal *fullboard* evaluasi register usaha, supervisi pengecekan lapangan data SBR, serta pengawasan kualitas pemutakhiran MFD dan MBS.

Indikator ketiga: Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran ini pada tujuan pertama sebesar Rp 120.760.000,-. Dari anggaran yang disediakan selama tahun 2023 dapat diserap Rp 120.012.954,- atau sebesar 99,38 persen. Anggaran yang berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, direncanakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan *fullboard* standar data statistik ekonomi, honor narasumber, pencetakan publikasi klasifikasi, dan supervisi klasifikasi dan standar data.

Penyerapan ini sebagian besar digunakan untuk Workshop Harmonisasi Peraturan BPS tentang Standar Data Statistik 2022 yang dilaksanakan pada bulan September 2023 dan supervisi standar data dan klasifikasi ke BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

Indikator keempat: Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas

Anggaran yang dialokasikan untuk menyediakan master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas sebesar Rp 1.207.374.000,-. Dari anggaran yang disediakan selama tahun 2023 dapat diserap Rp 1.169.877.446,- atau sebesar 96,89 persen. Anggaran ini berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Anggaran yang berasal dari kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan direncanakan untuk pembiayaan kegiatan *fullboard* luar kota dan perlengkapan Rekonsiliasi Kerangka Geospasial ST2023, honor narasumber dan supervisi pengolahan peta hasil ST2023. Pagu yang masih ada merupakan sisa penyerapan dari supervisi pengolahan peta hasil ST2023 yang belum optimal.

Indikator kelima: Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran ini pada tujuan kedua tidak ada karena pembinaan dilakukan berdasarkan permintaan dari Penanggung Jawab Kegiatan

(PJK) baik dari internal maupun eksternal BPS. Hal ini dilaksanakan karena adanya undangan baik sebagai peserta atau narasumber.

Indikator keenam: Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran ini pada tujuan kedua tidak ada karena kerjasama dilakukan berdasarkan permintaan dari eksternal BPS atau K/L/D/I yang terkait dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara kedua belah pihak.

3.3.3. Upaya Efisiensi Anggaran (penggunaan sumber daya)

Upaya efisiensi yang dilakukan Direktorat PMSS selama tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan pelatihan dan workshop secara online sehingga mengurangi biaya akomodasi untuk peserta pelatihan dan *workshop*.
2. Pengembangan beberapa sistem dan aplikasi dilaksanakan sepenuhnya dengan sumber daya internal BPS, dari analisis sistem sampai tim pengembang aplikasinya. Kegiatan ini melibatkan 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat PMSS dan Direktorat Sistem Informasi Statistik.
3. Pengembangan aplikasi *wilkerstat* berbasis android, sistem layanan Geoportal API, aplikasi Dashboard WebGIS administrator menggunakan *software* tidak berbayar (*open source*). *Developer* aplikasi tersebut berasal dari Direktorat PMSS. Hal ini meniadakan biaya pengadaan *software*.
4. Pemanfaatan layanan konsultasi klasifikasi statistik berbasis web (online) yang terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) dikelola bersama antara Direktorat PMSS dan Direktorat Diseminasi Statistik sehingga lebih efisien dalam komunikasi dan mudah diakses oleh pengguna secara satu pintu.
5. Pelaksanaan pembinaan Standar Data Statistik Nasional tahun 2023 terkait dengan LO dari BPS dan Kementerian/Lembaga yang terkait.
6. Laporan Klasifikasi Baku Klasifikasi Komoditas (KBKI) Pertanian masih menggunakan media zoom sehingga dapat menghemat pengeluaran anggaran terkait pembiayaan rapat biasa dengan tim Neraca dan tim ST2023, walaupun hanya beberapa kali di awal tahun 2023.

4.1. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat PMSS menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan. Kesimpulan ini tercermin dari Indikator Kinerja Utama sebagai acuan tingkat keberhasilan. Semua target sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dicapai dengan tingkat pencapaian indikator secara rata-rata sebesar 100 persen, bahkan lebih karena banyak permintaan pembinaan dan kerjasama baik dari internal maupun dari eksternal BPS.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Semakin banyaknya indikator statistik yang diperlukan oleh pengambil kebijakan menjadi tantangan bagi Direktorat PMSS untuk dapat menyusun metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas. Tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2023 adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai media dan metode pembelajaran, misalnya secara *online*, forum diskusi, *knowledge sharing* antar-pegawai di dalam unit kerja serta mengoptimalkan pengaturan beban tugas yang seimbang dari segi volume, waktu, kemampuan SDM, dan jumlah SDM.
- 2) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait di internal BPS dan peningkatan manajemen/tata kelola kegiatan dalam pelaksanaan desain sensus dan survei serta pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi, agar keseimbangan antara beban tugas, waktu, dan sumber daya yang tersedia tetap terjaga, dan tujuan tercapai.
- 3) Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal sangat dibutuhkan terutama teknologi *Geographical Information System (GIS)* dan *Remote Sensing (RS)* untuk kegiatan pengembangan kerangka sampel, kerangka geospasial tutupan lahan pertanian, *updating*, dan pengumpulan data kegiatan sensus dan survei. Pengembangan sistem aplikasi berbasis GIS juga perlu ditingkatkan untuk memudahkan proses pengumpulan data lapangan dan pengerjaan peta digital agar lebih efisien, akurat, dan tepat guna.
- 4) Penguatan statistik sektoral khususnya terkait pembinaan dan sosialisasi Satu Data Indonesia baru bisa dilakukan sampai ke daerah di tahun berikutnya.

- 5) Implementasikan manajemen perubahan dan manajemen risiko diterapkan sejalan dengan usaha peningkatan nilai SPIP secara lebih detail.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2023 sampai dengan 2020

2022		2020			2021			2022			2023		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas													
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	47	59	125,53	100	105,88	105,88	100	100	100	100	100	100

2022		2020			2021			2022			2023		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	5	6	120	4	4	100	6	6	100	6	6	100
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<p>Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data</p>													

2022		2020			2021			2022			2023		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	75	158	210,67	100	100	100	75	158	210,67	100	100	100
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100

Lampiran 2. Realisasi Kinerja per IKU dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun Pertama Periode Renstra (2020)

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra 2020	Realisasi 2023	Capaian (%)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas				
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	100,00	100,00	100,00
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	47 dokumen	63 dokumen (100%)	134,04
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	4,00	6,00	150,00
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	100,00	100,00	100,00
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data				
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	75,00	100,00	133,33
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	75,00	100,00	133,33

Lampiran 3. Realisasi Kinerja per IKU Tahun 2023 terhadap Target Renstra Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas				
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	100,00	100,00	100,00
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	100,00	100,00	100,00
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	6,00	6,00	100,00
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	100,00	100,00	100,00
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data				
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	100,00	100,00	100,00
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	100,00	100,00	100,00

Lampiran 4. Realisasi Kinerja per IKU Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas				
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	100,00	100,00	100,00
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	100,00	100,00	100,00
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	6,00	6,00	100,00
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	100,00	100,00	100,00
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data				
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	100,00	100,00	100,00
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	100,00	100,00	100,00

Lampiran 5. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Instansi : Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Misi :

1. Menyediakan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI).
2. Membina K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei.

Tujuan	Sasaran/Uraian	Indikator	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Tersedianya metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Penyediaan metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk mewujudkan data statistik berkualitas.	Meningkatkan kualitas perencanaan metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien.
	Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Penyediaan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Meningkatkan kualitas kerangka sampel yang terintegrasi dengan informasi geospasial yang akurat. Meningkatkan penggunaan daftar induk dan kode referensi dalam kegiatan statistik di Indonesia.
	Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Peningkatan penggunaan standar data dan klasifikasi statistik serta kode referensi di Indonesia	Meningkatkan penggunaan standar data, termasuk klasifikasi statistik, yang berkualitas dalam kegiatan statistik di Indonesia
	Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Penyediaan peta wilayah kerja statistik yang akurat	Meningkatkan kualitas kerangka sampel yang terintegrasi dengan informasi geospasial yang akurat

<p>Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data</p>	<p>Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei</p>	<p>Persentase pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani</p>	<p>Penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan statistik dengan K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei untuk membangun Satu Data Indonesia. - Mengembangkan sistem/aplikasi untuk mendukung penguatan metodologi sensus dan survei di lingkungan Direktorat PMSS guna peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja serta dapat meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan penyelenggara kegiatan statistik; - Meningkatkan sistem kerja melalui kebijakan reward and punishment dalam rangka menciptakan penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;
	<p>Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei</p>	<p>Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani</p>	<p>Penyelenggaraan kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kerja sama dalam kegiatan statistik dengan K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei untuk membangun Satu Data Indonesia. - Meningkatkan koordinasi antar kedeputan, direktorat, dan daerah dalam perencanaan sensus dan survei; dan - Meningkatkan penerapan proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).

Lampiran 6. Metadata Indikator Kinerja Utama Direktorat PMSS 2020-2024

INDIKATOR 1.1.	KONSEP DAN DEFINISI
<p>Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien menghasilkan data berkualitas (%)</p>	<p>Indikator ini menggambarkan kinerja PMSS dalam menghasilkan desain sensus dan survei serta ukuran sampel minimum yang andal, efektif, dan efisien. Desain sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien merupakan rancangan sensus dan survei yang tepat dan mampu memotret fenomena pada suatu domain sehingga hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat</p>
	<p>METODE PENGHITUNGAN</p>
	<p>Cara Perhitungan: 50% (Jumlah desain sensus dan survei yang dihasilkan oleh PMSS / jumlah permintaan desain × 100) + 50% (Jumlah penghitungan ukuran sampel minimum yang dihasilkan / jumlah permintaan penghitungan ukuran sampel minimum × 100)</p> <p>Rumus:</p> $I_1 = \left[\left(50\% \times \frac{D}{D_R} \right) + \left(50\% \times \frac{S}{S_R} \right) \right] \times 100\%$ <p>Keterangan: D= Desain sensus dan survei yang dihasilkan D_R= Desain sensus dan survei yang diminta S= Ukuran sampel minimum yang dihasilkan S_R= Ukuran sampel minimum yang diminta</p>
	<p>MANFAAT</p>
	<p>Mengukur tingkat penyediaan desain sensus dan survei dalam upaya mendukung SSN dan mengetahui tingkat penyekenggaraan sensus dan survei dalam penerapan GSBPM</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Jumlah naskah desain survei, tabel ukuran sampe minimuml, dokumen permintaan rancangan desain, dan ukuran sampel minimum suatu survei.</p>
	<p>DISAGREGASI</p>
	<p>Pusat (PMSS)</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p>
<p>Tahunan</p>	

INDIKATOR 1.2.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Indikator menggambarkan kinerja PMSS dalam menyediakan kerangka sampel yang akurat pada survei yang menerapkan probability sampling. Kerangka sampel yang akurat merupakan daftar unit populasi yang lengkap dan mutakhir.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan : Jumlah dokumen kerangka sampel yang dimutakhirkan/ Jumlah permintaan dokumen kerangka sampel × 100 %
	Rumus:
	$I_2 = \left[\left(\frac{d}{d_R} \times 100\% \right) \right]$
	Keterangan: <i>d</i> = Dokumen kerangka sampel yang dimutakhirkan <i>d_R</i> = Dokumen kerangka sampel yang diminta
	MANFAAT
	Mengukur penyediaan kerangka sampel untuk survei yang menerapkan probability sampling
	SUMBER DAN CAR PENGUMPULAN DATA
	Daftar sampel survei, dokumen kerangka sampel
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Tahunan	

INDIKATOR 1.3.	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	BPS (PMSS) sebagai pembina data wajib menyediakan standar data (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan) yang bersifat lintas instansi. Pengembangan klasifikasi dapat dibuat sebagai pengembangan terpisah.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara Perhitungan :</p> <p>Jumlah publikasi/laporan yang diterbitkan baik dengan kerangka regulasi maupun tidak</p> <p>Rumus:</p> $I_3 = \sum p$ <p>Keterangan:</p> <p><i>p</i> = Publikasi/laporan yang diterbitkan baik dengan kerangka regulasi maupun tidak</p>
	MANFAAT
	Menjaga keterpaduan dan keterbandingan data yang dihasilkan produsen data baik internal maupun eksternal BPS
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Publikasi resmi standar data statistik dan publikasi resmi klasifikasi statistik
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Berkala

INDIKATOR 1.4.	KONSEP DAN DEFINISI
<p>Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas</p>	<p>Indikator ini menggambarkan kinerja PMSS dalam menyediakan master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas. Master dan peta yang mutakhir mencakup jumlah wilayah yang mutakhir berdasarkan Perka Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik kondisi terkini, sedangkan kualitas mencakup perbaikan batas dan akurasi peta wilkerstat.</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>50% (Jml master wilkerstat diupdate/jml pemutakhiran wilkerstat yang dilaporkan x 100) ditambah 50%x (Jml peta yang diupdate/jml master wilkerstat yang diupdate x 100)</p> <p>Rumus:</p> $I_4 = \left[\left(50\% \times \frac{JW_u}{JW_l} \right) + \left(50\% \times \frac{JP_u}{JP_l} \right) \right] \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>JW_u = Jumlah master Wilkerstat yang diupdate</p> <p>JW_l = Jumlah pemutakhiran wilkerstat yang dilaporkan</p> <p>JP_u = Jumlah peta yang diupdate</p>
	MANFAAT
	<p>Mengukur tingkat penyediaan master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas untuk mendukung kegiatan sensus dan survei, serta menjaga kesesuaian antara master wilkerstat dan petanya.</p>
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	<p>Master wilayah kerja statistik yang dimutakhirkan melalui sistem pemutakhiran MFD dan MBS. Peta yang dimutakhirkan baik secara pemutakhiran kuantitas (mengikuti pemutakhiran wilayah) dan kualitas</p>
	DISAGREGASI
	PMSS
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	

INDIKATOR 2.1.	KONSEP DAN DEFINISI
<p>Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani.</p>	<p>Indikator ini menggambarkan pembinaan dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa konsultasi dan pemberian rekomendasi metodologi (<i>technical assistance</i>).</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>(Jumlah permintaan pembinaan bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani / jumlah total permintaan pembinaan) x 100%.</p> <p>Rumus:</p> $I_{5.1} = \left(\frac{p^*}{\sum p} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>p^* = permintaan pembinaan yang dilayani</p> <p>p = total permintaan pembinaan</p>
	MANFAAT
	<p>Mengetahui banyaknya produsen data yang akan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan SSN dan SDI. Indikator ini dapat digunakan dalam perencanaan kegiatan pembinaan metodologi sensus dan survei bagi K/L/D/I.</p>
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	<ul style="list-style-type: none"> - surat undangan, - surat permintaan koordinasi
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR 2.2.	KONSEP DAN DEFINISI
<p>Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani</p>	<p>Indikator ini menggambarkan permintaan kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan. Kerja sama yang dilakukan dapat berupa penyusunan metodologi sampling survei, cakupan klasifikasi, dan standar data statistik yang akan digunakan.</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>(Jumlah permintaan kerja sama yang dilayani / Jumlah total permintaan kerja sama) x 100%.</p> <p>Rumus:</p> $I_{5.2} = \left(\frac{p^*}{\sum p} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>p^* = permintaan kerja sama yang dilayani</p> <p>p = permintaan kerja sama</p>
	MANFAAT
	<p>Mengetahui banyaknya produsen data yang akan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan SSN dan SDI. Indikator ini dapat digunakan dalam perencanaan kegiatan pembinaan metodologi sensus dan survei bagi K/L/D/I.</p>
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	<p>- surat undangan,</p> <p>- surat permintaan kerjasama,</p>
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

Lampiran 7. Jumlah SDM Direktorat PMSS Menurut Jabatan dan Jenjang Pendidikan (Kondisi Desember 2023)

No	Jabatan	Jenjang Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
1	Direktur	1					1
2	Statistisi Ahli Utama	1					1
3	Statistisi Ahli Madya	1	6	1			8
4	Statistisi Ahli Muda	1	16	6			23
5	Statistisi Ahli Pertama		4	17			21
6	Pranata Komputer Ahli Muda			1			1
7	Pranata Komputer Ahli Pertama			7	1		8
8	Staf dan Fungsional Umum		2	4	2	2	10
Jumlah		4	28	36	3	2	73

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710

Telp: 021 3841195, 3842508, 3810291, Faks: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpshq@bps.go.id